

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL
PERUNDINGAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL -
KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI



Klik untuk
mengunduh



Scan QR Code untuk membaca online



Laporan Triwulan I

PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI - DJATMIKO BRIS WITJAKSONO

Pada tahun 2024, Indonesia fokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral. Perundingan perjanjian bilateral yang tengah dirundingkan antara lain adalah Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-EAEU FTA, Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Jordania PTA, dan Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA. Sejumlah perkembangan dari perundingan yang terjadi sampai dengan Triwulan I 2024 antara lain adalah perundingan putaran ke-17 Indonesia-EU CEPA, perundingan putaran ke-4 Indonesia-EAEU FTA, perundingan putaran ke-4 Indonesia-Canada CEPA, pertemuan intersesi ke-7 Indonesia-Iran PTA, dan peluncuran perundingan Indonesia-Sri Lanka PTA.

Laporan Kinerja Ditjen PPI Triwulan I ini merupakan sarana untuk memantau dan melaporkan kemajuan proses pencapaian kinerja Ditjen PPI selama periode Januari s.d. Maret 2024 dan membandingkannya dengan target tahunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2024 berdasarkan Rencana Kerja tahun 2024 dan Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020—2024.

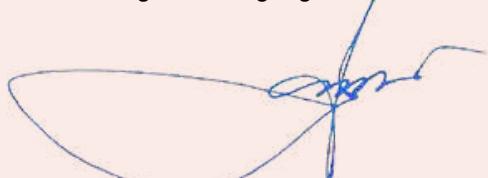
Laporan ini juga disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP.

Kami harap laporan ini menjadi salah satu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Ditjen PPI dan mendorong peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh SDM Ditjen PPI sampai dengan akhir tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, 22 April 2024

Direktur Jenderal

Perundingan Perdagangan Internasional,



Djatmiko Bris Witjaksono

Ringkasan Eksekutif – Highlights Kegiatan Dirjen PPI Pada Triwulan I Tahun 2024

TW 1

2024

Januari

11 Jan, Dirjen PPI, Djatmiko Bris Witjaksono memimpin Pertemuan The 6th Trade Negotiating Committee (TNC) ASEAN - Canada FTA (ACAFTA). Pertemuan ini membahas perkembangan perundingan pada isu outstanding rencana kerja negosiasi periode 2024-2025, dan laporan perkembangan negosiasi Subsidiary Bodies (SBs) dalam ACAFTA



16 Jan, Dirjen PPI, menerima kunjungan Chief Negotiator Uni Eropa untuk perundingan IEU CEPA, Mr. Fabien Gehl di Kantor Kementerian Perdagangan



21 Feb, Dirjen PPI mewakili Menteri Perdagangan menjadi Panelis pada sesi Diskuis Panel pada "WTO Parliamentary Conference" yang merupakan Side-Events dari Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) WTO di Abu Dhabi, PEA.



25 Feb, Dirjen PPI memimpin pertemuan Kelompok G-33 menjelang Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) WTO di Abu Dhabi, PEA. Pertemuan tersebut sepakat untuk mendorong solusi permanen untuk Public Stockholding for Food Security Purpose (PSH) melalui Joint Ministerial Statement yang akan disampaikan pada KTM13 WTO sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan serta memberikan dukungan kepada petani skala kecil.



25 Feb, Dirjen PPI selaku Ketua Delegasi RI pada KTM ke-13 WTO memimpin Indonesia pada Pertemuan Bilateral dengan Mr. Asis G. Perez, Undersecretary for Policy, Planning and Regulation, Filipina. Pertemuan ini membahas perkembangan perundungan pertanian di WTO. Kedua negara sepakat mendorong penyelesaian perundungan pertanian di WTO yang belum menghasilkan perkembangan signifikan setelah sekitar lama.



25 Feb, Dirjen PPI, mewakili Mendag RI menghadiri Pertemuan Menteri Cairns Group menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO di Abu Dhabi, PEA. Pertemuan yang dihadiri negara anggota Cairns Group tersebut membahas isu pertanian WTO sebagai upaya konsolidasi pandangan menjelang pelaksanaan KTM13 WTO.

TW 1 2024

27 Feb, Dirjen PPI menerima permintaan pertemuan bilateral Menteri Perdagangan dan Industri Afrika Selatan, H.E. Ebrahim Patel di sela Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO di Abu Dhabi, PEA. Pertemuan tersebut mendiskusikan pandangan dan posisi terkait isu-isu prioritas pada perundingan di KTM13 WTO.



28 Feb, Dirjen PPI menyempatkan melakukan pertemuan bilateral dengan Dirjen Perdagangan Swedia, Per-Arne Hjelmborn. Pertemuan tersebut mendiskusikan pandangan serta posisi kedua negara dalam isu prioritas di KTM13 WTO.



04 Mar, Dirjen PPI memimpin delegasi Indonesia dalam Perundingan Putaran Ketujuh Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), delegasi Kanada dipimpin oleh Associate Assistant Deputy Minister Global Affairs Canada, Aaron Fowler



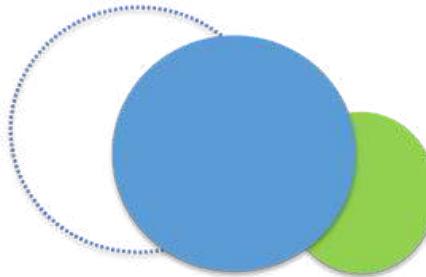
04 Mar, Dirjen PPI selaku Chief Negotiator Indonesia melakukan Chief Negotiators Meeting dengan Aaron Fowler, selaku Chief Negotiator Kanada. Pertemuan ini membahas perkembangan perundingan Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA) dan Outstanding issues yang perlu diselesaikan pada Putaran Ketujuh kali ini.

09 Mar, Dirjen PPI sebagai alternate AEM, memimpin DELRI pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN Retreat ke-30 di Luang Prabang. Para Menteri menyepakati pengesahan capaian prioritas ekonomi Keketuan Laos, prioritas tahun 2024, dan mencatat berbagai perkembangan perundingan dan kerja sama.



14 Maret, Dirjen PPI mendampingi Wamendag dalam Peluncuran Perundingan Indonesia-Sri Lanka Preferential Tariff Agreement. Delegasi Sri Lanka diwakili oleh Menteri Negara urusan Luar Negeri, Mr.Tharaaka Balasuriya. Penandatanganan Peluncuran dilakukan secara simultan melalui aplikasi konferensi video. Perundingan PTA Indonesia Sri Lanka merupakan arahan pemimpin kedua negara yang diinisiasi pada tahun 2017. Bagi Indonesia, Sri Lanka merupakan mitra penting di kawasan Asia Selatan dan memiliki potensi besar





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI	001
RINGKASAN EKSEKUTIF	002
DAFTAR ISI	004
DAFTAR TABEL	005
DAFTAR GAMBAR	006

1

BAB I

PENDAHULUAN	007
LATAR BELAKANG	012
MAKSUD DAN TUJUAN	012
AKUNTABILITAS KINERJA	017
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	018

2

BAB II

REALISASI ANGGARAN	070
PENUTUP	073
KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN I 2024	074
UPAYA DALAM MENGEFETIFIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN I 2024	075

LAMPIRAN

Lampiran 1	079
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024	
Lampiran 2	080
Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2024	
Lampiran 3	081
Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2024	
Lampiran 4	082
Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja	
Lampiran 5	084
Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional s.d Triwulan I Tahun 2024	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Tahun 2024	014
Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Tahun 2024	018
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	021
Tabel 4. Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra	022
Tabel 5. Weighted NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Tahun 2024	042
Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2	043
Tabel 7. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC)	045
Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3	049
Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4	056
Tabel 10. Klarifikasi terhadap Kebijakan Indonesia / Mitra Indonesia	057
Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5	058
Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6	065
Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7	067
Tabel 14. Realisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan I Tahun 2024	070

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA	041
Gambar 2. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi	064
Gambar 3. Total Layanan FTA Center Triwulan I 2024 di Jakarta, dan Semarang, serta FTA Support Center Bandung	068
Gambar 4. Layanan FTA Center dan Support Center Triwulan I 2024	069
Gambar 5. Layanan Website FTA Center Triwulan I 2024	069
Gambar 6. Perbandingan Capaian Anggaran Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024	071

1

Pendahuluan

Tujuan umum dari perundingan perdagangan internasional adalah meningkatkan akses pasar barang dan jasa dari Indonesia di pasar luar negeri, serta memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia jasa dari Indonesia untuk berkembang di luar negeri. Perundingan perdagangan internasional juga berusaha melindungi dan mendorong investasi di Indonesia.

Strategi peningkatan akses pasar dilakukan multitrack melalui fora multilateral, regional, dan bilateral. Pada fora multilateral bertumpu pada sistem perdagangan multilateral di forum World Trade Organization (WTO), pada fora regional, Indonesia fokus pada ASEAN dan APEC, sedangkan bilateral, Indonesia berorientasi pada penjajakan pengembangan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA).



Pencapaian Utama

Key Achievements



INDEKS NON-TARIFF MEASURES (NTMS) DENGAN NEGARA MITRA FTA INDONESIA PADA TRIWULAN I 2024 TERCATAT SEBESAR

4,82

Input perhitungan merupakan jumlah NTMs kumulatif in force sampai dengan periode 31 Maret 2024. Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 4105 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Adapun secara umum, NTMs ini didominasi oleh Sanitary and Phytosanitary Measures dan Technical Barriers to Trade. Negara China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrument NTMs terbanyak sampai dengan triwulan I 2024.



NILAI EKSPOR KE NEGARA MITRA PERJANJIAN PERDAGANGAN PADA TRIWULAN I 2024 MENCAPAI

US\$ 27,68
Miliar

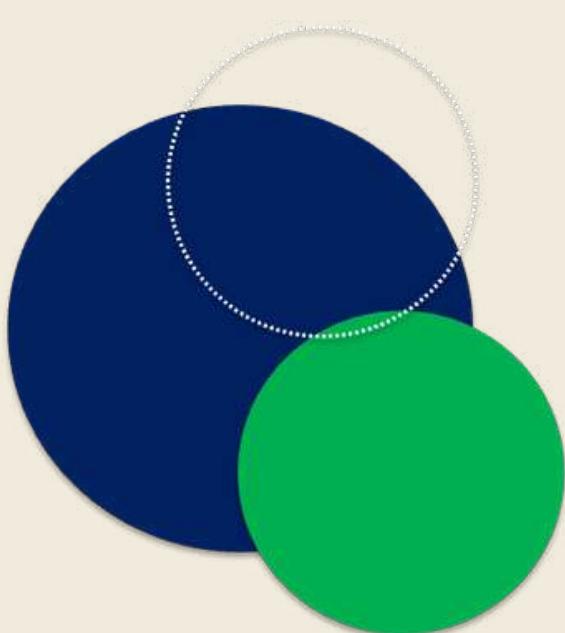
Pada triwulan I 2024, pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional mencatatkan capaian sebesar **69,60%** dari total nilai ekspor Indonesia ke dunia. Angka ini merupakan angka pada bulan Januari 2024.



PENGAMANAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PENGAMANAN AKSES PRODUK EKSPOR INDONESIA DI NEGARA MITRA PADA TRIWULAN I 2024 MENCAPAI

25%

Pada triwulan I 2024, Ditjen PPI telah melakukan klarifikasi kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra.





**POSI PENTINGAN
PERDAGANGAN INDONESIA YANG
DITERIMA DALAM
DEKLARASI/STATEMENT DI
TINGKAT REGIONAL DAN
INTERNASIONAL PADA TRIWULAN I
2024 MENCAPAI**

0%

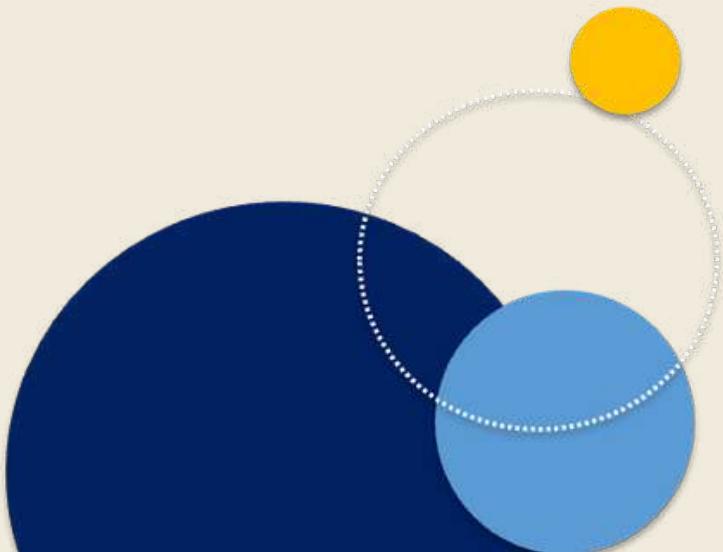
Pada Triwulan I 2024 Ditjen PPI belum berhasil menyampaikan posisi pentingan perdagangan Indonesia untuk diterima dalam Deklarasi/Statement di tingkat Regional dan Internasional pada Triwulan I 2024 dikarenakan beberapa forum yang menghasilkan deklarasi/statement baru akan berjalan pada Triwulan II/III Tahun 2024.



**PEMANGKU PENTINGAN DAN
PELAU USAHA YANG
MENDAPATKAN INFORMASI
TENTANG PELUANG DAN TATA
CARA PEMANFAATAN FTA PADA
TRIWULAN I 2024 MENCAPAI**

397
Orang

Pada triwulan I 2024, FTA Center di dua kota dan FTA Support Center memberikan layanan kepada total 397 orang. Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) menjadi topik yang paling banyak memperoleh perhatian dari masyarakat, sebagiannya adalah terkait akses pembiayaan dan tata cara ekspor, dan strategi promosi dan pemasaran ke negara mitra FTA.



BANDAR LAMPUNG, 5 - 7 DECEMBER





LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I bertujuan untuk memantau dan mengukur kemajuan atau progress atas program dan kegiatan serta mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu triwulan anggaran. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja Ditjen PPI dilakukan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan secara berkala.

Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Ditjen PPI dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap

perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Ditjen PPI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.



REALISASI CAPAIAN KINERJA DITJEN PPI TRIWULAN I TAHUN 2024

Pada tahun 2024 perekonomian global masih dihadapkan dengan perjuangan melawan inflasi dan perang Rusia dan Ukraina yang juga belum usai, Indonesia, dengan berbagai tantangan dan



dinamika perundingan yang terjadi memberikan perhatian lebih kepada penyelesaian perundingan perdagangan internasional. Percepatan penyelesaian berbagai perundingan menjadi sangat penting karena akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan dan memberikan manfaat bagi Indonesia.

Pada tahun 2024, Indonesia berfokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-EU CEPA; (2) Indonesia-Canada CEPA; (3) Indonesia-EAEU FTA; (4) Upgrading ATIGA; dan (5) Upgrading ASEAN-China FTA.

Beberapa perkembangan dalam perundingan menjadi capaian penting sampai dengan triwulan I tahun 2024. Sejumlah perkembangan dari perundingan yang terjadi sampai dengan triwulan I 2024 antara lain (1) perundingan putaran ke-17 Indonesia-EU CEPA; (2) perundingan putaran ke-4 Indonesia-EAEU FTA; (3) perundingan putaran ke-7 Indonesia-Canada CEPA; dan (4) peluncuran perundingan Indonesia-Sri Lanka PTA serta berbagai upaya secara intensif dan koordinasi dengan K/L terkait untuk merumuskan posisi atas pending articles maupun usulan klausul dalam draft text perjanjian, dan memastikan cakupan akses pasar yang berimbang dalam rangka mengakomodasi kepentingan progres dalam penyelesaian perundingan.

Proses persiapan harmonisasi agar selanjutnya diproses ke Kementerian Hukum dan HAM adalah perjanjian Indonesia-Chile CEPA Chapter Trade in Services (IC-CEPA TIS).

Beberapa kemajuan perundingan di regional ASEAN antara lain (1) putaran ke-20 Pertemuan AANZFTA-JC di mana penandatanganan The 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA menjadi salah satu Prioritas Ekonomi Indonesia; (2) pertemuan The 3rd RCEP Joint Committee; (3) The Special Meeting ACAFTA TNC; dan (4) AEM Retreat yang diselenggarakan di Magelang Jawa Tengah.

Pada kerja sama perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional, Indonesia telah berhasil menandatangi Persetujuan Kopi Internasional (International Coffee Agreement/ICA) 2022. Dengan ditandatangannya ICA 2022 diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan sektor kopi nasional yang berkelanjutan dan mendorong stabilitas harga. Ditjen PPI juga secara aktif menyampaikan Specific Trade Concern (STC) offensive dan defensive Indonesia di forum WTO, serta notifikasi peraturan Indonesia ke WTO sebagai bentuk transparansi kebijakan.

Capaian lain yang juga sangat penting pada triwulan I 2024 adalah ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ASEAN Trade In Services Agreement (ATISA) melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengesahan ASEAN Trade In Services Agreement pada tanggal 16 Januari 2024,

serta implementasi atau Entry into Force (EIF) RCEP dan Indonesia-Korea CEPA (IK-CEPA).

Laporan Kinerja Triwulan I disusun sebagai sarana pemantauan progres dari realisasi indikator kinerja dan capaian secara periodik, sehingga tercapai keselarasan antara pelaksanaan program dan pencapaian target dengan Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2023 dan Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020-2024. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Perdagangan memiliki tanggung jawab untuk melakukan perundingan perdagangan di berbagai forum internasional.

Pada tahun 2024, dalam Perjanjian Kinerja DJPPI ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi. Tabel 1 menyajikan realisasi dan capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan Ditjen PPI sampai dengan triwulan I tahun 2023.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Tahun 2024

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional				
1	Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	46	69,60	133,91
	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	4,5	4,82	93,33
	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	0	0

2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
4	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	20	25%
	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	0	0
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA				
6	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	0	0
	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku usaha	2.000	397	19,85
Rata-rata Capaian Triwulan I Tahun 2024					38,95
Rata-rata Capaian Triwulan I Tahun 2023					53,39

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Perhitungan capaian pada triwulan I tahun 2024 diperoleh dengan cara membandingkan realisasi pada triwulan I dengan target tahunan. Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan I tahun 2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Tujuh indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan kemajuan (progress), bahkan IK-1 menunjukkan capaian lebih dari 100% pada triwulan I. Tiga indikator yang capaiannya masih belum dapat dihitung yaitu IK-3 “Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional”, IK-5 “Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement ditingkat regional dan internasional dan IK-6 “Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani”.

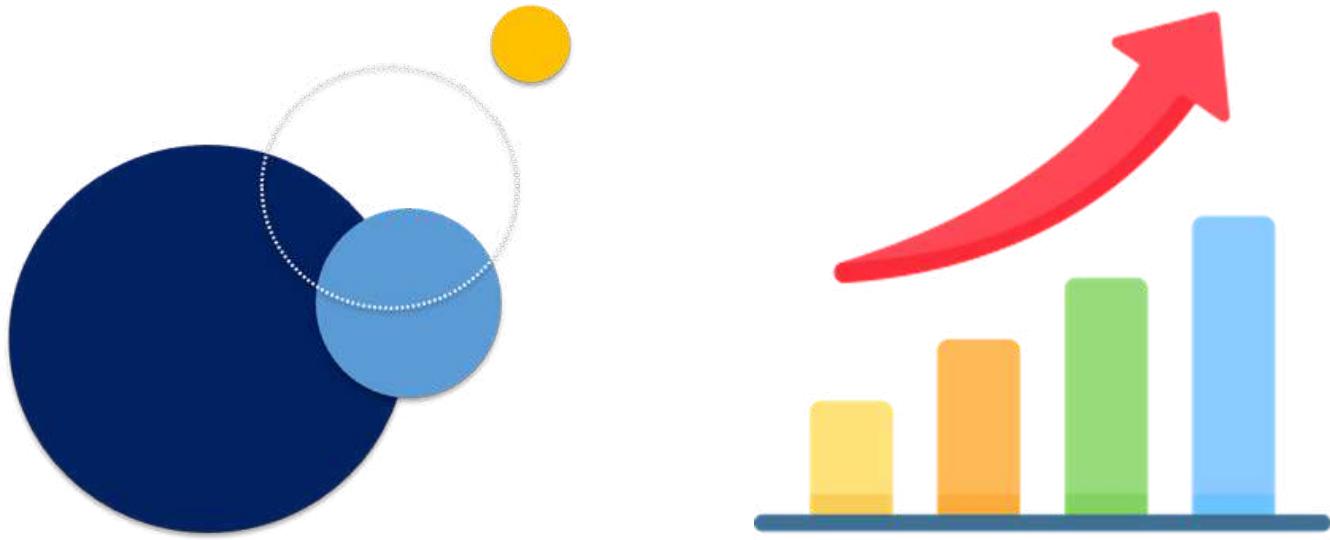
Secara rata-rata, capaian kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar 38,95.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 181.592.401.000,- Adanya kebijakan Automatic Adjustment pada triwulan I mengakibatkan Ditjen PPI memblokir anggaran sejumlah Rp.15.000.000.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan untuk kegiatan pada triwulan I sejumlah Rp. 166.592.401.000,-. Realisasi anggaran yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I tahun 2024 oleh Ditjen PPI adalah Rp. 38.496.921.652,- atau dengan nilai capaian sebesar 23,11 persen.

Akuntabilitas Kinerja

Merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Ditjen PPI secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.





A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2024, Ditjen PPI telah menetapkan 3 sasaran program dengan 7 indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran organisasi. Secara rata-rata, capaian kinerja Ditjen PPI pada triwulan I tahun 2024 sebesar 38,95 persen. Rata-rata ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2023. Dikarenakan ada beberapa indikator yang belum dapat terlaksana. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, target, realisasi dan capaian kinerja Ditjen PPI triwulan I tahun 2024 dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Tahun 2024

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional				
1	1 Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	45	69,60	133,91
	2 Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	4,5	4,82	93,31
	3 Kesepakatan perundungan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	0	0
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
2	4 Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	20	25
	5 Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	0	0

3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA				
6	Percentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	0	0
7	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku usaha	2.000	397	19,85
Rata-rata Capaian Triwulan I Tahun 2024					38,95
Rata-rata Capaian Triwulan I Tahun 2023					53,39

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Pengukuran pencapaian sasaran meliputi penetapan indikator sasaran, penetapan rencana tingkat capaian (target), penghitungan realisasi indikator sasaran, dan pembandingan target dan realisasi untuk mendapatkan persentase capaian untuk masing-masing indikator. Dalam mengukur capaian kinerja digunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (s.d TW 1)}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Ditjen PPI Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Sasaran Program 1

Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional

Indikator Kinerja Program 1:

Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional

Indikator Kinerja pertama (IK-1) disusun sebagai upaya untuk menunjukkan kontribusi dan manfaat perjanjian perdagangan internasional terhadap nilai total ekspor Indonesia. Perjanjian perdagangan internasional

membuka akses pasar di negara mitra sehingga akan membuka potensi peningkatan ekspor dan menjaga daya saing ekspor terhadap serbuan produk kompetitor dari negara lain. Indikator kinerja ini dihitung dengan persamaan:

$$IK - 1_t = \frac{\sum X_{kt}}{\sum X_{jt}} \times 100$$

Dimana:

X_{kt} = Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia di tahun berjalan

X_{jt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan

X_{jt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan

Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu berupa data total ekspor Indonesia dan ekspor Indonesia ke masing-masing negara tujuan yang sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Daftar negara yang dimasukkan disesuaikan dengan perjanjian kerja sama perdagangan yang terkategori sudah diratifikasi dan sudah dipublikasi secara rutin oleh PPI.

Terdapat 24 (dua puluh empat) negara mitra yang sudah melakukan perjanjian perdagangan internasional dengan Indonesia yaitu Australia, ASEAN (Brunei Darussalam, Burma, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam), EFTA (Islandia, Liechtenstein, Swiss, dan Norwegia), Chile, Hongkong, India, Jepang, Korea Selatan, Mozambik, Pakistan, Palestina, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selandia Baru.

Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

INDIKATOR : Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional (%)					
Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
45	70,72	157,15	46	69,60	133,91

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Hasil perhitungan IK-1 dapat menunjukkan outcome hasil implementasi perjanjian di mana ketika FTA itu dimanfaatkan oleh pelaku usaha maka pangsa pasar (share) ekspor Indonesia ke negara mitra akan meningkat. Perhitungan realisasi pencapaian kinerja persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional dilakukan dengan membandingkan nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional sampai dengan triwulan I tahun 2024, dari data yang diolah pada periode Januari - Februari 2024 yaitu sebesar US\$ 27,68 miliar, dengan total nilai ekspor Indonesia ke dunia yaitu sebesar US\$ 39,77 miliar. Sehingga realisasi indikator kinerja-1 sebesar 69,60 persen atau dengan capaian 151,31 persen dibandingkan target tahun 2023. Nilai ekspor Indonesia Februari 2024 mencapai US\$ 19,27 miliar atau turun 8,88 persen dibanding ekspor Januari 2024. Dibanding Februari 2023 nilai ekspor turun sebesar 9,60 persen.

Dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023, capaian triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,15 poin atau 23,34%. Meningkatnya capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Februari 2024 mencapai US\$ 39,77 miliar atau turun 8,89 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Sementara ekspor non-migas mencapai US\$ 37,15 miliar atau turun 10,27 persen dibanding periode yang sama pada 2023.
- Ekspor non-migas Februari 2024 mencapai US\$ 18,06 miliar, turun 5,44 persen dibanding Januari 2024, sementara itu turun 10,32 persen jika dibanding ekspor non-migas Februari 2023.
- Peningkatan terbesar ekspor non-migas Februari 2024 terhadap Januari 2024 terjadi pada komoditas bijih, kerak, dan abu logam sebesar US\$ 223,5 juta (1,28 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada besi dan baja sebesar US\$ 623,3 juta (3,45 persen).
- Menurut sektor, ekspor non-migas hasil industri pengolahan Januari–Februari 2024 turun 7,68 persen dibanding periode yang sama tahun 2023, demikian juga ekspor hasil pertambangan turun 15,97 persen, sedangkan ekspor hasil pertanian naik 4,84 persen.
- Ekspor non-migas Februari 2024 terbesar adalah ke Rep. Rakyat Tiongkok yaitu US\$ 4,06 miliar, disusul Amerika Serikat US\$ 2,1 miliar dan India US\$ 1,52 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 20,69 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar US\$ 3,09 miliar dan US\$ 1,38 miliar.

Peningkatan tersebut juga didorong dengan beberapa perjanjian sudah memasuki tahap implementasi sehingga dimanfaatkan oleh pelaku usaha, serta pemahaman yang baik yang dimiliki oleh pelaku usaha atas perjanjian perdagangan yang telah diimplementasi sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkannya. Sampai dengan triwulan I 2024, Indonesia telah menyepakati 38 perjanjian perdagangan internasional termasuk PTA/FTA/CEPA meliputi perjanjian perdagangan bilateral, regional, dan multilateral.

21 perjanjian telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar internasional, meliputi wilayah ASEAN, Jepang, Pakistan, Chile, Australia, India, Selandia Baru, Rep. Rakyat Tiongkok, Hong Kong, EFTA, Mozambique dan Korea Selatan. Pada tahun 2024, Indonesia meratifikasi beberapa perjanjian perdagangan yang sudah ditandatangani untuk bisa segera diimplementasi.

Berdasarkan data ekspor triwulan I tahun 2024 share ekspor negara ASEAN menempati urutan kedua setelah China yaitu sebesar 19,33% dengan nilai ekspor US\$ 13,8 miliar. Share ekspor negara mitra yang lain dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra

No	Negara	Nilai Ekspor (US\$)	Share Ekspor (%)
1.	Rep. Rakyat Tiongkok	4.822.832.163	23,53
2.	ASEAN	3.961.943.238	19,33
3.	India	1.785.521.256	8,71
4.	Jepang	1.652.952.536	8,07
5.	Korea Selatan	932.085.233	4,55
6.	Australia	315.168.583	1,54
7.	Pakistan	289.719.655	1,41
8.	Hongkong	224.749.402	1,10
9.	United Arab Emirates	213.016.341	1,04
10.	EFTA	112.024.969	0,55
11.	Selandia Baru	47.277.087	0,23
12.	Chile	25.689.908	0,13
13.	Iran	16.265.180	0,08
14.	Mozambik	10.430.587	0,05
15	Palestina	274.822	0,00

Sumber: PDSI, diolah (2024)

Kebijakan Perdagangan dan Strategi Multi-track Kerja sama Perdagangan Internasional Indonesia

Sampai dengan triwulan I 2024, Indonesia telah menyepakati sejumlah perjanjian perdagangan internasional termasuk PTA/FTA/CEPA meliputi perjanjian perdagangan bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar internasional.



Strategi Multi-track Kerja sama Ekonomi Internasional Indonesia



Kebijakan kerja sama ekonomi internasional didasari oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pasal 82-87 yang terkait dengan Kerja sama Perdagangan Internasional. Pada Pasal 82 disebutkan bahwa kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional ditujukan untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Tujuan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam berbagai bentuk forum-forum kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional ataupun bilateral. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia menjalankan kebijakan dan strategi kerja sama ekonomi internasional yang disebut dengan istilah strategi "multi-track". Indonesia secara bersamaan aktif di berbagai forum dan organisasi kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional, ataupun bilateral. Berbagai perjanjian kerja sama tersebut ada yang hanya mencakup kerja sama ekonomi dan ada juga yang lebih komprehensif, yang mencakup berbagai bidang atau isu-isu lain diluar ekonomi, perdagangan dan investasi. Beberapa forum kerja sama bersifat mengikat (binding), sedangkan beberapa lainnya bersifat tidak mengikat (non-binding).

Masing-masing forum kerja sama ekonomi tersebut penting karena memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Karena koordinasinya yang relative lebih mudah, forum-forum kerja sama ekonomi bilateral biasanya lebih lebih komprehensif dan lebih mengikat dibanding forum kerja sama regional dan multilateral. Pada forum kerja sama ekonomi bilateral, seperti perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement (FTA)) bilateral, Indonesia memiliki keleluasan untuk bergerak sendiri dan mandat yang ditetapkan oleh undang-undang ataupun presiden dapat lebih mudah untuk dilakukan, dibanding pada forum-forum kerja sama regional ataupun multilateral lain, seperti ASEAN, APEC dan G20. Keterlibatan aktif Indonesia pada forum-forum kerja sama regional dan multilateral diperlukan agar tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.



Namun, hal ini tidak berarti bahwa forum-forum kerja sama regional ataupun multilateral yang sifatnya tidak mengikat ini menjadi tidak penting atau tidak perlu. Perjanjian multilateral, regional dan bilateral harus berjalan secara paralel. Selain untuk kepentingan ekonomi, forum-forum kerja sama ekonomi regional dan multilateral tersebut tetap penting untuk kepentingan politik internasional Indonesia. Walaupun sifatnya tidak mengikat (non-binding) dan sukarela (voluntary), forum multilateral, seperti G20 dan forum regional, seperti APEC, bisa memberikan pengaruh yang besar. Keduanya sering menjadi rujukan mengenai kondisi geopolitik atau ekonomi global.

Selain itu, forum-forum tersebut biasanya lebih mengarah pada kerja sama ekonomi yang sifatnya lebih luas dan lebih maju, yang mencakup berbagai isu-isu sensitif, seperti isu reformasi World Trade Organization (WTO), ekonomi digital, dan ekonomi hijau (green economy), yang mandek atau sulit untuk dibahas di forum-forum yang sifatnya lebih mengikat. Dengan sifatnya yang cenderung tidak mengikat, Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas dan bisa memilih atau menyuarakan pendapat mengenai isu-isu yang cocok untuk kepentingan negara ini. Dengan mandeknya WTO, kerja sama ekonomi internasional lain dijalankan Indonesia melalui forum-forum regional dan multilateral lainnya ini dengan negara-negara yang sepemikiran.

Selanjutnya, forum-forum ini juga bisa menjadi “jembatan penghubung” ke forum yang sifatnya lebih mengikat. Contohnya, APEC memang sebuah kerja sama ekonomi internasional yang sifatnya tidak mengikat (non-binding), tapi jika terdapat isu-isu perundingan yang sifatnya lebih mengikat hal tersebut dapat diangkat di forum tersebut, seperti rencana pembentukan The Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP). Di sini, APEC memiliki peran penting sebagai jembatan untuk perjanjian yang sifatnya lebih mengikat.

Hal yang sama juga terjadi untuk ASEAN, forum kerja sama regional ini pada mulanya hanya merupakan kerja sama pakta pertahanan, tetapi kemudian kerja sama ekonominya terus berkembang menjadi kerja sama ekonomi yang sifatnya lebih mengikat dengan lahirnya ASEAN Free Trade Area (AFTA). Selanjutnya, posisi geopolitik dan ekonomi ASEAN yang penting untuk kepentingan internal ASEAN dan komunitas global telah menarik negara-negara lain untuk turut juga bekerja sama dengan ASEAN ataupun negara-negara anggotanya, sehingga melahirkan berbagai bilateral FTA antara masing-masing anggota negara ASEAN dengan mitra ataupun berbagai forum regional ASEAN+1 FTA dan terkini pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

KERJA SAMA MULTILATERAL

Indonesia telah berperan aktif dan berupaya terus mengoptimalkan perannya dalam berbagai kerja sama ekonomi internasional. Di tingkat multilateral, negara ini merupakan anggota asli yang ikut menandatangani perjanjian GATT dan telah menjadi anggota aktif WTO sejak pendiriannya pada tahun 1995. Di bawah kerangka WTO, Indonesia mengikuti Agenda Pembangunan Doha dan pengembangan GATS. Sebagai anggota kelompok Cairns Group, G-33, dan G20, Indonesia secara bersama-sama turun serta aktif dalam negosiasi pertanian. Bersama dengan negara-negara G-33, Indonesia mengajukan Produk Khusus (Special Product (SP) dan Kebijakan Perlindungan Khusus (Special Safeguard Measures (SSM).

Proposal tersebut didasari oleh kepentingan Indonesia dan negara-negara lain guna mengurangi kemiskinan, menjaga keamanan pangan dan mendorong pembangunan pedesaan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, kecuali Singapura, Indonesia juga telah memfokuskan dan menjadi pendukung utama dari pengamanan bersyarat domestik berdasarkan Pasal X GATS.

Dalam kerangka kerja sama multilateral yang lebih luas, dan sejalan dengan perjanjian fasilitasi perdagangan WTO, melalui United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam negosiasi Kerangka Perjanjian Fasilitasi Perdagangan Lintas Perbatasan Tanpa Kertas (Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade).

Selain itu, untuk melengkapi proses kerja sama ekonomi di forum multilateral lainnya, Indonesia juga diuntungkan oleh berbagai inisiatif Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD).

Di luar kerangka WTO, Indonesia merupakan anggota G20 dan pada tahun 2022 mendapat giliran menjadi presiden G20. Indonesia mendukung upaya G20 untuk reformasi WTO dan berbagi pandangannya mengenai pentingnya menyediakan rujukan politik yang kuat dan arah strategi untuk memperbaiki fungsi dari WTO guna mendukung dan mempertahankan peran WTO sebagai tulang punggung dari sistem perdagangan internasional.

Selain itu, Indonesia juga mendorong kepentingan nasional jangka pendek dan panjangnya dalam forum G20, seperti pembiayaan campuran (blended finance) untuk pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs), peran industri kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengakuan terhadap biofuel sebagai cara untuk mencapai penggunaan dan pengembangan energi yang lebih bersih dan peran perempuan sebagai agen perdamaian. Selain G20 ini, Indonesia juga aktif dalam forum kerja sama Development Eight (D-8) dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Forum kerja sama ekonomi multilateral lain yang telah berkontribusi pada peran Indonesia di bidang perdagangan multilateral adalah afiliasi aktif Indonesia pada beberapa lembaga komoditas internasional.

Lembaga-lembaga komoditas internasional tersebut antara lain: International Tripartite Rubber Council (ITRC), International Coffee Organization (ICO), Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), Asian and Pacific Coconut Community (APCC), International Pepper Community (IPC), Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), International Cocoa Organization (ICCO), dan the International Coconut Community (ICC). Selain sebagai pendiri dan anggota aktif dari organisasi-organisasi komoditas internasional tersebut, pada tahun 2019 Indonesia juga pernah terpilih sebagai ketua ICO, ANRPC, dan ITRC.

KERJA SAMA REGIONAL

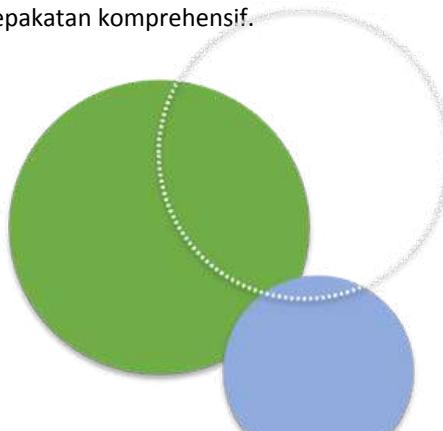
Pada tingkat regional Indonesia juga merupakan salah satu penggagas dan anggota Association of South East Asia Nations (ASEAN) yang didirikan pada 1967. Di bawah kerangka kerja sama ASEAN, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya telah menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama ASEAN tentang peningkatan kerja sama ekonomi (1992) untuk membentuk Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama (the Common Effective Preferential Tariff (CEPT)) yang bertujuan untuk mencapai sebuah kawasan perdagangan bebas di ASEAN (ASEAN Free Trade Area (AFTA)).

Selain itu, terdapat juga kesepakatan mengenai Kerangka Kerja Sama ASEAN di bidang Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)) pada 1995, yang mengarahkan liberalisasi di bidang jasa di atas komitmen WTO dan kerja sama antara para penyedia Jasa di ASEAN; serta Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN pada 1998 yang ditujukan untuk memfasilitasi aliran bebas investasi langsung, teknologi dan pekerja profesional berketerampilan.

Saat ini, Indonesia, bersama-sama negara anggota ASEAN lainnya, sedang melakukan proses peninjauan terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community (AEC)). AEC ini bertujuan untuk memajukan terbentuknya pasar tunggal yang memungkinkan terjadinya arus bebas barang, jasa dan tenaga kerja terampil dan modal pada tahun 2015. Untuk mewujudkan AEC ini, negara anggota ASEAN membentuk AEC Blueprint yang menetapkan target dan tenggat waktu untuk memajukan bidang ekonomi.

Sebagai kelanjutan dan implementasinya, Kesepakatan Bersama Skema Tarif Preferensial Efektif untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)) ditinjau dalam 2008 dan disempurnakan menjadi instrumen hukum yang lebih komprehensif menjadi ASEAN Trade in Goods Perjanjian (ATIGA) yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada Mei 2010.

Selain meninjau perjanjian investasinya, ASEAN selanjutnya juga telah mengembangkan Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)), yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada 29 Maret 2012. ACIA menggantikan Perjanjian Investasi ASEAN yang ada dan Perjanjian Penjaminan Investasi ASEAN dan menyatakan liberalisasi, perlindungan, promosi, dan langkah-langkah fasilitasi di bawah satu kesepakatan komprehensif.



Indonesia dan ASEAN memiliki lima perjanjian terkait dengan perdagangan dan investasi. Pertama, Protokol ke-4 untuk Amandemen Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA). Kedua, Protokol ke-1 untuk Mengamandemen Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) untuk mengizinkan sertifikasi mandiri secara luas ASEAN (The ASEAN Wide Self-Certification). Ketiga, Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN (ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA)). Keempat, Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket ke-10 di bawah Kerangka Kesepatan Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)). Terakhir, Perjanjian ASEAN tentang E-Commerce.

Indonesia juga telah memutuskan untuk fokus pada ASEAN sebagai inti pengaturan perdagangan berbasis regional.

Dalam kerangka ASEAN-plus FTAs, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah mengimplementasikan Regional Trade Agreements (RTA) dengan mitra lain. Indonesia melalui ASEAN telah melaksanakan atau meratifikasi lima perundungan regional yang mencakup tujuh mitra dagang, yaitu: ASEAN-China FTA (AC-FTA); ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ-FTA); ASEAN-India FTA (AI-FTA); ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJ-CEP); ASEAN-Korea FTA (AK-FTA); serta Perjanjian FTA dan Investasi ASEAN-Hong Kong dan the ASEAN-JAPAN Investment, Services and MNP Agreement.

Selanjutnya, ASEAN bersama mitra perjanjian perdagangan bebas (RRT, Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru) juga baru saja menyetujui Perjanjian Kerja sama Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)). Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang atau isu, seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, e-commerce, kekayaan intelektual, persaingan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, ASEAN juga sedang dalam proses negosiasi dengan Canada di bawah Kerangka ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA). Selain itu, ASEAN juga melakukan kerja sama Perdagangan dan Investasi dengan US dalam kerangka ASEAN-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) serta masih aktif dalam negosiasi di bawah kerangka kerja sama Asia-European Meeting (ASEM).

Sementara itu, peran serta dan interaksi kerja sama ekonomi dan perdagangan intra-regional Indonesia semakin difasilitasi juga melalui kerja sama ekonomi regional lainnya, seperti East Asia Summit (EAS), the Indian Ocean Rim Association (IORA), dan the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Indonesia adalah salah satu negara pendiri APEC yang dibentuk pada tahun 1989.

Di forum IORA, Indonesia menjadi ketua untuk periode 2015-2017. Selama periode kepemimpinan Indonesia tersebut, negara Indonesia memimpin kelompok ini dalam presentasi gagasan dan inisiatif strategis dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan yang telah disepakati bersama anggotanya.

Melalui APEC, Indonesia telah menerima manfaat penting yang tidak berwujud, namun dapat dirasakan manfaatnya dalam hal perluasan kapasitas dan pembangunan pengetahuan dalam liberalisasi perdagangan dan investasi, dan fasilitasi, meskipun merupakan forum yang tidak mengikat secara hukum (non-binding), akan tetapi dapat mengikat secara politis. Pada forum ini, Indonesia terus aktif mengajukan berbagai inisiatif untuk mempromosikan dan memfasilitasi perdagangan dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini termasuk mendukung implementasi TFA WTO, meningkatkan kerja sama Ekonomi untuk lebih berpartisipasi dalam rantai pasok global (GVCs) dan konektivitas regional, mengoptimalkan manfaat ekonomi digital bagi semua masyarakat dan berkolaborasi dalam upaya menjembatani kesenjangan digital, mengatasi langkah-langkah non-tarif yang menghambat perdagangan produk pertanian, dan mempromosikan internasionalisasi dan meningkatkan akses bagi UMKM di kawasan Asia-Pasifik.

KERJA SAMA BILATERAL

Selain kerja sama ekonomi multilateral dan regional di atas, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia juga mulai aktif mengupayakan akses pasar yang lebih besar melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas bilateral (bilateral FTA). Kebijakan FTA bilateral Indonesia pada awalnya berfokus pada mitra dagang terbesarnya, Jepang. Selama 2005-2007, kedua negara telah mengadakan beberapa putaran Kemitraan Ekonomi untuk mengembangkan perjanjian ekonomi bilateral yang komprehensif, yang terdiri dari liberalisasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama di bidang investasi, kebijakan persaingan dan pergerakan orang. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) akhirnya ditandatangani pada Agustus 2007 dan mulai diimplementasikan pada Juli 2008.

Selanjutnya, fokus Indonesia dialihkan untuk mencari tambahan pelengkap dari perjanjian luas ASEAN, untuk mempersiapkan perjanjian yang lebih komprehensif di masa depan (misalnya EFTA) dan aliansi strategis lainnya. Indonesia telah menyetujui tiga perjanjian kerja sama bilateral, yaitu Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Mozambique PTA, dan Indonesia-Korea CEPA. Sementara itu, terdapat sembilan negosiasi perjanjian perdagangan bilateral yang masih berjalan atau dalam proses peninjauan, di antaranya adalah: Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Jordan PTA, and the Protocol to Amend Indonesia-Japan EPA.



Nilai ekspor Indonesia ke negara-negara yang telah menyelesaikan FTA hingga Tahun 2024 menyumbang 69,60% dari total ekspor pada Tahun 2024 (Tabel 4), dan jika negara-negara yang sedang melakukan negosiasi FTA saat ini akan dimasukan, presentase ini akan meningkat menjadi 75,61%. Jika FTA yang sedang dibahas akan dimasukan, sekitar 85,72% perdagangan luar negeri Indonesia akan dicapai dalam sistem FTA.

Untuk mengharapkan keuntungan ekonomi yang tinggi dari FTA dengan negara tertentu, FTA harus komprehensif dan jangkauan pembukaan pasar harus luas. Khususnya, rasio penghapusan tarif yang masuk dalam kategori segera harus tinggi, dan ketentuan asal barang dalam bentuk yang netral dan tidak terlalu ketat harus diadopsi dalam perjanjian.



Perkembangan Perundingan

Ditjen PPI secara aktif berupaya memperluas akses perdagangan Internasional Indonesia dengan melakukan negosiasi dengan calon mitra FTA dan peningkatan FTA yang telah berjalan saat ini untuk menjamin FTA tersebut tetap relevan, tangguh, modern dan semakin memfasilitasi perdagangan.



PERKEMBANGAN PERUNDINGAN

Pada tahun 2024, Indonesia akan menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-EU CEPA; (2) Indonesia-Canada CEPA; (3) Indonesia-EAEU FTA; (4) Indonesia-Peru CEPA; (5) Indonesia-Bangladesh PTA; (6) Indonesia-Jordania PTA; (7) Indonesia-Tunisia PTA; (8) Upgrading ATIGA; dan (9) Upgrading ASEAN-China FTA. Perkembangan perundingan yang dilakukan sampai dengan Triwulan I pada tahun 2024 antara lain:

INDONESIA-EU CEPA

Perundingan Indonesia-EU CEPA menjadi perhatian utama Presiden saat ini dan salah satu perundingan prioritas. Sesuai mandat Presiden Indonesia dan Presiden Komisi Eropa, perundingan ini ditargetkan selesai pada tahun 2024. Sampai dengan Triwulan I tahun 2024, telah dilaksanakan satu kali putaran perundingan yaitu putaran ke-17 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari - 1 Maret 2024 di Bandung, Jawa Barat.

Pada putaran ke-17, kedua pihak berhasil menyepakati secara teknis tiga Bab (Kerja Sama Sistem Pangan Berkelanjutan, Hambatan Teknis Perdagangan, dan Ketentuan Institusional) sehingga total 11 dari 21 Bab telah diselesaikan. Pembahasan akses pasar barang, jasa, investasi, dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum juga mengalami kemajuan.

Putaran ke-18 akan dilaksanakan pada tanggal 13-17 Mei 2024 di Brussels, Belgia, sedangkan untuk penandatanganan Indonesia-EU CEPA ditargetkan pada tahun 2024.





INDONESIA-CANADA CEPA

Perundingan Indonesia-Canada CEPA telah dilaksanakan sebanyak empat kali putaran. Pada TW I 2024 telah dilaksanakan putaran ke-7 secara tatap muka pada tanggal 4-8 Maret 2024 di Semarang, Indonesia.

Perundingan mencatat hasil positif dengan disepakatinya Chapter TIS-Telecommunication dan Chapter Competition Policy secara substansial. Untuk akses pasar barang, kedua pihak akan menggunakan kategori eliminasi dan pengecualian untuk modalitas akses pasar, serta akan melakukan pertukaran intial request di bulan April 2024. Selain itu, beberapa Kelompok Kerja yang telah mencapai kemajuan pembahasan signifikan antara lain Ketentuan Asal Barang, Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan, Sanitasi dan Fitosanitasi, dan Perdagangan Jasa: Pergerakan Sementara Orang Perorangan .

Pertemuan Ketua Tim Perunding dilakukan Tiga Pertemuan Intensif dan Indonesia menyampaikan: (1) Usulan pembentukan Chapter Trade and Sustainable Development (TSD) sebagai wadah negosiasi untuk isu, Labour, Environment, dan Perdagangan Inklusif; (2) Work Plan penyelesaian perundingan ICA-CEPA di akhir tahun 2024, dan (3) Rencana penyusunan parallel agreement untuk Critical Minerals Dialogue dan Green Project Funding. Perundingan Putaran Kedelapan akan dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 29 Mei – 2 Juni 2024 di Ottawa, Kanada. ICA-CEPA ditargetkan akan selesai secara substansial pada akhir tahun 2024.



INDONESIA-PERU CEPA

Indonesia dan Peru telah sepakat untuk melaksanakan putaran pertama Indonesia - Peru CEPA secara fisik pada 27-30 Mei 2024 di Lima, Peru. Indonesia dan Peru telah melaksanakan pertukaran List of Leads by Working Group Indonesia - Peru CEPA dan pertukaran data perdagangan. Indonesia dan Peru akan melaksanakan pertukaran zero draft text untuk 8 (delapan) Chapter pada 29 April 2024.

Indonesia akan menyampaikan 5 (lima) zero draft text, yaitu: (i) National Treatment and Market Access for Goods (NTMA); (ii) Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS); Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF); (iv) Legal and Institutional Issues (LII); dan (v) Rules of Origin (ROO). Sedangkan dari pihak Peru akan menyampaikan 3 (tiga) zero draft text, yaitu: (i) Technical Barriers to Trade (TBT); (ii) Trade Remedies; dan (iii) Cooperation.



INDONESIA-EURASIAN ECONOMIC UNION (EAEU) FTA

Perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) FTA telah dilaksanakan sebanyak empat kali putaran. Pada TW I 2024 telah dilaksanakan putaran ke-4 pada tanggal 18 - 20 Maret 2024 di Erevan, Armenia.

Perundingan mencapai kemajuan signifikan dalam pembahasan teks perjanjian diselesaikannya 4 dari 15 total bab yaitu, Bab Administrasi Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan, Bab Kekayaan Intelektual, Bab Standar, Peraturan Teknis, Prosedur Penilaian Kesesuaian, dan Bab Transparansi. Kemajuan substansial juga dicapai di seluruh isu runding lainnya, sehingga diperkirakan teks perjanjian dapat disepakati di putaran selanjutnya.

Dalam pembahasan akses pasar barang, Indonesia dan EAEU telah mempertukarkan request dan offer list.

Perundingan putaran ke-5 diagendakan akan dilaksanakan pada 22 Juli 2024 di Indonesia. IEAEU-FTA ditargetkan akan selesai secara substansial pada tahun 2024.

PROTOKOL PERUBAHAN INDONESIA-JAPAN EPA

Dalam rangka penyelesaian perundingan Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA, Indonesia telah melakukan sejumlah upaya antara lain:

- Surat Menteri Perdagangan kepada Pemerintah Jepang (Menteri Luar Negeri/MOFA; Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri/METI; dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (MAFF) tertanggal 13 Februari 2023 yang menyampaikan 1) dorongan agar Jepang mengakomodir kepentingan Indonesia terkait akses pasar produk perikanan dan tenaga kerja Indonesia; 2) komitmen untuk menyelesaikan Protokol Perubahan IJEPA agar dapat ditandatangani pada ASEAN Summit di Jakarta (September 2023) atau ASEAN Japan Commemorative Summit di Tokyo (Desember 2023).

- Technical Experts Meeting Fisheries Management pada 17 Maret 2023 di Tokyo (Indonesia: Kemendag dan KKP, Jepang: MOFA dan MAFF). Pertemuan membahas isu pengelolaan perikanan khususnya cakalang dan tuna. Pada pertemuan tersebut, MAFF belum dapat mengakomodir permintaan Indonesia terkait akses pasar untuk 4 pos tarif tuna kaleng. Atas jawaban tersebut, Indonesia menegaskan bahwa isu tuna merupakan “red line” Indonesia.

Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA ditargetkan dapat diselesaikan secara substansial pada Mei 2023 (kecuali untuk akses pasar tuna kaleng yang menunggu tanggapan Jepang.)

Protokol Perubahan IJEPA diharapkan dapat ditandatangani pada saat ASEAN Summit di Jakarta (September 2023) atau ASEAN Japan Commemorative Summit di Tokyo (Desember 2023), menyesuaikan penyelesaian proses domestik kedua negara.



INDONESIA-BANGLADESH PTA

Menteri Perdagangan telah bersurat kepada Presiden RI pada tanggal 28 Maret 2024 untuk meminta arahan penyelesaian perundingan IB-PTA. Diharapkan ada keputusan final terkait kelanjutan perundingan dengan opsi (i) mengakomodasi kepentingan Bangladesh untuk request produk garmen, atau (ii) mengusulkan penghentian perundingan apabila Indonesia u.p Kemenperin tidak dapat memenuhi permintaan Bangladesh.

INDONESIA-JORDAN PTA

Telah terlaksana Technical Meeting Indonesia - Jordan PTA dengan hasil Indonesia telah menyampaikan usulan timeline dan TOR Perundingan namun pihak Jordan menyampaikan bahwa mereka masih membutuhkan waktu untuk diskusi secara internal.

INDONESIA-TUNISIA PTA

Kedua pihak telah sepakat terkait pelaksanaan Pertemuan Intersesi ke-6 Indonesia-Tunisia PTA tanggal 17-19 April 2024 di Tangerang, Indonesia.

Akses Pasar: (i) Kesepakatan terkait pertukaran revised offer dalam HS 2022 dengan didahului pertukaran data perdagangan terkini, MFN terbaru, dan Tabel Korelasi. (ii) Indonesia menyepakati distribusi produk per kategori modalitas usulan Tunisia dengan syarat mengakomodir produk interest kedua negara.



INDONESIA-SRI LANKA PTA (LAUNCHING PERUNDINGAN)

14 Maret 2024, Wakil Menteri Perdagangan dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Sri Lanka melakukan Penandatanganan Peluncuran Perundingan Indonesia-Sri Lanka Preferential Trade Agreement (ISL-PTA) yang berlangsung secara virtual.

Peluncuran Perundingan ini akan membawa kedua negara selangkah lebih dekat dengan perjanjian perdagangan bebas yang akan memperkuat hubungan dagang bilateral Indonesia dan Sri Lanka. ISL-PTA akan mencakup perdagangan barang dan sejumlah bidang lain yang disepakati bersama dengan tujuan mendapatkan manfaat bersama sambil menghormati kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. ISL-PTA dapat menciptakan akses pasar yang akan meningkatkan perdagangan bilateral di tengah perlambatan ekonomi dan berbagai tantangan lainnya.

Putaran Pertama Perundingan ISL-PTA akan dilaksanakan setelah Indonesia dan Sri Lanka sepakat menentukan tanggal pelaksanaan perundingan. Wamendag mendorong kedua pihak untuk bertemu langsung pada semester I tahun 2024.

ASEAN-CANADA FTA

Setelah perundingan ACAFTA diluncurkan pada Pertemuan the 10th AEM-Canada Consultation tahun 2021, pertemuan mencatat sejumlah capaian sebagai berikut:

- Terms of Reference (TOR) untuk ACAFTA TNC dan Negotiating Guidelines to Conduct the ACAFTA Negotiations telah disepakati;
- Telah dibentuk 17 Subsidiary Bodies (SBs) di bawah TNC; dan
- ACAFTA TNC Work Plan tahun 2022 telah disepakati, dengan pemahaman bahwa dokumen tersebut berupa living document.



Putaran perundingan ACAFTA telah berjalan sebanyak delapan kali (7 kali putaran perundingan TNC dan 1 kali pertemuan special TNC). Pertemuan ACAFTA-Trade Negotiating Committee (TNC) ke-7 telah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari - 1 Maret 2024, di Kuala Lumpur. Kelompok Kerja didorong untuk mengintensifkan perundingan dalam mencapai target penyelesaian perundingan ACAFTA sebesar 50% pada tahun 2024 dan penyelesaian substansial secara keseluruhan pada 2025.

UPGRADING ATIGA

Negosiasi Upgrading ATIGA telah resmi diluncurkan pada tahun 2022, sampai saat ini, pertemuan telah dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali. Perundingan yang ke-sembilan telah dilaksanakan pada tanggal 19-22 Maret 2024, yang membahas usulan elemen baru untuk Upgrading ATIGA; yaitu:



- Economic and Technical Cooperation (ECOTECH);
- Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME);
- Circular Economy and Remanufactured Goods;
- Electronic Commerce Aspects of Trade Facilitation;
- Trade in Crisis Situation;
- Export Restrictions on Food and Agricultural Products;
- Trade and Environment;
- MFN Treatment;
- Scheduling of Tariff Commitments;
- Transposition of Tariff Reduction Schedules (TRS); dan
- Mekanisme penyelesaian isu-isu ATIGA di bawah ATF-JCC.

Penyelesaian perundingan secara substantial conclusion ditargetkan pada November tahun 2024 dan penyelesaian perundingan secara keseluruhan pada Februari 2025 serta penandatangan pada Pertemuan Summit ke-46 di November 2025.

UPGRADING ASEAN-CHINA FTA

Upgrading ASEAN-China FTA telah diluncurkan negosiasinya oleh Kepala Negara pada KTT ASEAN-China tanggal 11 November 2022 dengan penambahan elemen baru seperti digital economy, green economy, supply chain connectivity, competition, consumer protection, dan UMKM untuk memastikan Upgrading ACFTA harus inklusif, modern, dan responsif isu global.

Negosiasi Perundingan Putaran ke-1 tanggal 7 Februari 2023 telah menyepakati Special ACFTA-JC menjadi badan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perundingan Upgrading ACFTA selama dua tahun yang dibantu oleh 12 Working Group yaitu:

- Working Group Trade in Goods (WG-TIG)
- WG on Investment (WGI);
- WG on Green Economy (WGE);
- WG on Digital Economy (WGDE);
- WG on Consumer Protection and Competition (WGCC);

- WG on Standards, Technical Regulation and Conformity Assesment Procedure (WG STRACAP)
- Working Group on Economic and Technical Cooperation
- Working Group on Sanitary and Phyto-Sanitary Measures (WG-SPS)
- Working Group Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF),
- Working Group on Micro, Small and Medium Enterprises (MSME);
- Sub-Committee on Rules of Origin, dan
- Working Group on Legal and Institutional Issues (WGLII).

Telah dilaksanakan Pertemuan ke-5 pada tanggal 29 Januari - 02 Februari 2024 di Hangzhou, RRT. Indonesia berjuang membawa kepentingan Indonesia di berbagai isu kerja sama, seperti perdagangan barang, ekonomi digital, ekonomi hijau, investasi, standar, kepabeanan, fasilitasi perdagangan, perlindungan konsumen, dan isu kerja sama lainnya dalam wadah ACFTA.



Indikator Kinerja Program 2:

Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia

Kinerja penurunan hambatan perdagangan non-tarif didekati dengan konstruksi indeks yang dikalkulasi dari publikasi statistik World Trade Organization (WTO). Secara spesifik, komputasi indikator rata-rata tarif terbobot dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

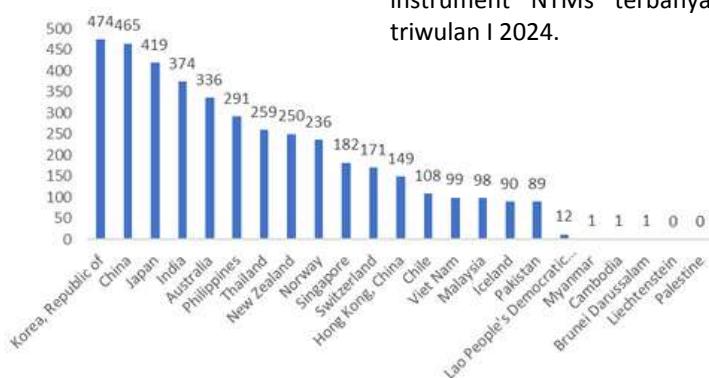
Tahap pertama yaitu persiapan data, dilakukan dengan mengunduh data NTMs pada database khusus yang menghitung besaran NTMs di setiap negara anggota yang dinamakan Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP). Berikut adalah link yang digunakan untuk memperoleh database dimaksud: <https://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableView.aspx>. Dalam statistik tersebut, dapat terlihat perkembangan kebijakan NTMs yang dikenakan oleh suatu negara terhadap barang yang dieksport oleh negara mitra dagang.

Terdapat beberapa ruang lingkup yang diterapkan dalam perhitungan nilai indeks penurunan Non Tariff Measures. Rekapitulasi NTM dilakukan pada 23 negara mitra FTA dan CEPA Indonesia dalam kerja sama bilateral dan regional yang telah diimplementasikan. Adapun secara spesifik ruang lingkup kerja sama yang menjadi acuan adalah:

Indonesia-Japan EPA, ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Indonesia-Pakistan PTA, ASEAN-Korea FTA (AKFTA), Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products, Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods). ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN-China FTA (ACFTA), Indonesia-Australia CEPA, ASEAN-Hong Kong, China FTA & Investment Agreement serta Indonesia-EFTA CEPA.

Perhitungan kinerja indeks Non Tariff Measures dengan mitra FTA/CEPA mempunyai fokus observasi pada NTMs yang bersifat in force sehingga pengukuran indeks ini tidak melengkapi potensial NTMs. Input perhitungan merupakan jumlah NTMs kumulatif in force sampai dengan periode 31 Maret 2024.

Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 4105 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Adapun secara umum, NTMs ini didominasi oleh Sanitary and Phytosanitary Measures dan Technical Barriers to Trade. Negara China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrument NTMs terbanyak sampai dengan triwulan I 2024.



Sumber: <http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search> diakses pada tanggal 2 April 2024

Gambar 1. Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA

Tahap kedua, komputasi indeks Non Tariff Measures terdiri dua langkah. Setelah memperoleh data NTM untuk setiap negara mitra dagang utama tersebut, masing-masing klasifikasi NTM untuk setiap negara dijumlahkan dan dibobot berdasarkan pangsa pasar ekspor masing-masing negara. Pangsa pasar ekspor dihitung berdasarkan total nilai ekspor 23 negara pada kondisi di tahun 2020. Baseline pangsa pasar di tahun 2020 digunakan sebagai pembaharuan perhitungan indeks Non-Tariff Measures dikarenakan telah terjadi perubahan secara substansial terkait konsentrasi pangsa

pasar di negara mitra dagang FTA dan CEPA pasca implementasi kerja sama perdagangan. Output yang dihasilkan dalam langkah pertama adalah nilai terbobot 23 negara dijumlahkan sehingga diperoleh total NTM terbobot dari 23 negara mitra dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Weighted NTM}_t = \sum_j (\sum_i NTB_{ij} \times MS_j)$$

Keterangan:

j = negara mitra yang ditentukan

i = jenis NTMs/NTB (Non Tariff Measure/Barrier)

MS = market share pada tahun baseline

Tabel 5. Weighted NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Tahun 2024

No	Negara Mitra FTA/CEPA	Jumlah NTMs in force pada 2020	Jumlah NTMs in force pada TW I 2024	Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA/CEPA Tahun 2020
1	Australia	329	337	0.01535
2	Selandia Baru	248	250	0.00294
3	Rep. Rakyat Tiongkok	442	465	0.19475
4	Hong Kong	149	149	0.01247
5	India	357	374	0.06370
6	Korea Selatan	446	474	0.03988
7	Malaysia	81	98	0.04963
8	Singapura	182	182	0.06533
9	Pilipina	286	291	0.03616
10	Thailand	246	259	0.03132
11	Viet Nam	91	99	0.03028
12	Burma	1	1	0.00632
13	Kamboja	1	1	0.00332
14	Brunei Darussalam	1	1	0.00079
15	Laos	12	12	0.00003
16	Chili	108	109	0.00089
17	Swiss	157	171	0.01470
18	Norwegia	236	236	0.00033
19	Iceland	90	90	0.00001
20	Liechtenstein	0	0	0.00000
21	Jepang	403	419	0.08374
22	Palestina	0	0	0.00001
23	Pakistan	87	89	0.01462

Sumber: <http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search>
diakses pada tanggal 10 April 2024

Langkah selanjutnya dalam tahap komputasi indeks adalah dengan melakukan indeksasi weighted NTMs yang telah diperoleh dengan membaginya dengan nilai NTMs baseline di tahun 2020. Semakin rendah indeks NTMs mengindikasikan penurunan indeks NTM apabila dibandingkan dengan indeks NTM di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan mitra dagang utama dalam rangka mencegah potensi implementasi regulasi yang menjadi barriers dalam perdagangan.

$$IK - 2_t = \frac{\text{Weighted NTM}}{\text{NTM}_{\text{baseline}}} \times 100$$

Tahapan ketiga adalah tahapan pengolahan capaian realisasi rata-rata nilai terbobot. Untuk menghitung capaian dari realisasi indikator ini Ditjen PPI menggunakan rumus “perbandingan terbalik” yang mengartikan bahwa semakin kecil realisasi maka semakin tinggi capaiannya, atau semakin baik kinerjanya. Berikut adalah rumus perhitungan capaian dari realisasi indikator:

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan rumus di atas, maka realisasi indikator nilai index NTM pada triwulan I adalah 4,82. Dengan kata lain capaian kinerja Ditjen PPI untuk IK-2 mencapai 103,81% dari target yang ditetapkan.

Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

INDIKATOR : Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia					
Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5,0	4,82	103,81	4,5	4,82	93,36

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Dibandingkan dengan tahun 2024, tidak terdapat penurunan realisasi namun terjadi peningkatan target sehingga capaian terlihat menurun. Penurunan tidak terlihat dalam persentase tetapi dengan adanya peningkatan target dari target triwulan I tahun 2023 adalah 5,0 dan target triwulan I tahun 2024 adalah 4,5.

Sehingga capaian di triwulan I tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan triwulan I tahun 2023, yaitu menjadi 93,36 persen.

Penerapan kebijakan NTMs yang semakin meningkat dipengaruhi oleh situasi global di mana negara-negara di dunia memiliki kecenderungan untuk protektif terhadap kepentingan nasionalnya, sehingga beberapa negara menerapkan kebijakan non tarif measures.

Meningkatnya penerapan kebijakan non-tarif yang diterapkan oleh negara importir menimbulkan keresahan tersendiri bagi negara-negara eksportir khususnya negara berkembang. Penerapan kebijakan non-tarif ini dapat menghambat perdagangan internasional dan akses pasar.

Beberapa langkah diplomasi untuk mengawal isu akses pasar khususnya penurunan hambatan Non-Tarif sesuai dengan komitmen untuk menghapus kebijakan Non-Tariff Barriers (NTBs) atau hambatan non tariff dilakukan secara intensif melalui fora regional ASEAN dan multilateral via WTO. Secara spesifik, diplomasi terkait NTMs sampai dengan triwulan I 2024 mencakup beberapa deskripsi berikut.

Diplomasi NTMs di ASEAN

Terdapat mekanisme untuk mewujudkan komitmen tersebut dimana setiap negara anggota ASEAN dapat mengajukan keberatan terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara lainnya, untuk kemudian dibahas dan dikompilasi dalam Matrix of Actual Cases (MAC). ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC) dalam hal ini menjadi badan penanggung jawab di ASEAN yang melakukan reviu atas NTMs yang telah dinotifikasi oleh negara anggota ASEAN.

Di tahun 2024, terdapat 12 (duabelas) kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC) yang membutuhkan penyelesaian. Sebanyak 5 (lima) NTMs merupakan kasus yang ditujukan kepada Indonesia sebagai Responding Country dan 2 (dua) kasus diajukan Indonesia kepada beberapa AMS. Pertemuan ATF-JCC ke-28 pada triwulan I tahun 2024, telah sepakat untuk menyelesaikan kasus 4012 TH (Pest Free Area). Perkembangan ketujuh kasus tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 7. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC)

No	Kasus	Perkembangan
1	IDN-VN, TKDN 4G LTE	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia mengusulkan akan berkoordinasi dengan KOMINFO untuk memberikan bantuan teknis jika memang ada eksportir Vietnam yang kesulitan memenuhi kebijakan TKDN. Menanggapi usulan Indonesia, Vietnam akan melakukan konsultasi domestik.
2	ID – VN, Anti Circumvention Gula	<ul style="list-style-type: none"> Viet Nam akan mengupayakan agar agensi terkait dapat segera memberikan tanggapan atas 2 (dua) pertanyaan Indonesia terkait timeline dan mekanisme Interim Review Anti-circumvention.
3	ID – MM, Ekspor Cat	<ul style="list-style-type: none"> Myanmar menyarankan agar Indonesia memberikan nomor pengajuan aplikasi dan nama perusahaan cat untuk diberikan kepada pihak berwenang di Myanmar, sehingga Myanmar dapat memfasilitasi aplikasi non-automatic import licensing produk cat Indonesia dimaksud.
4	ID-TH, Registrasi Obat	<ul style="list-style-type: none"> Thailand meminta Indonesia menghapus pasal 9 dan 10 Permenkes No. 1010/2008 karena melanggar WTO dan mempertimbangkan akan memberi daftar produk obat Thailand yang ingin dieksport ke Indonesia. Lebih lanjut, Thailand meminta daftar produk obat yang sudah diproduksi secara domestik di Indonesia.
5	ID- TH, Pest Free Area (PFA)	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan mencatat penyelesaian 1 (satu) kasus yaitu Kasus 4012TH (Pest Free Area) antara Thailand-Indonesia dan mendorong AMS yang terlibat untuk memperkuat diskusi bilateralnya untuk mempercepat resolusi kasus pada MAC.
6	ID – TH, Ketentuan Importasi Ban	<ul style="list-style-type: none"> Thailand masih melakukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk bisa menutup kasus ini dan akan menyampaikan perkembangannya pada pertemuan ATFJCC berikutnya.
7	ID – TH, Ketentuan Impor AC	<ul style="list-style-type: none"> Meskipun SNI Air Conditioner sudah diterima oleh eksportir Thailand namun kebijakan terkait alokasi impor yang dikenakan Indonesia memberatkan eksportirnya dan meminta Indonesia mencari solusinya.

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Diplomasi NTMs di WTO

Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berperan aktif dalam penanganan Non Tariff Measures (NTMs) di berbagai pertemuan Komite di WTO. Concerns yang disampaikan Indonesia atas kebijakan negara mitra yang terindikasi dan telah menghambat ekspor produk Indonesia disampaikan dalam berbagai pertemuan Komite di WTO sebagai berikut:



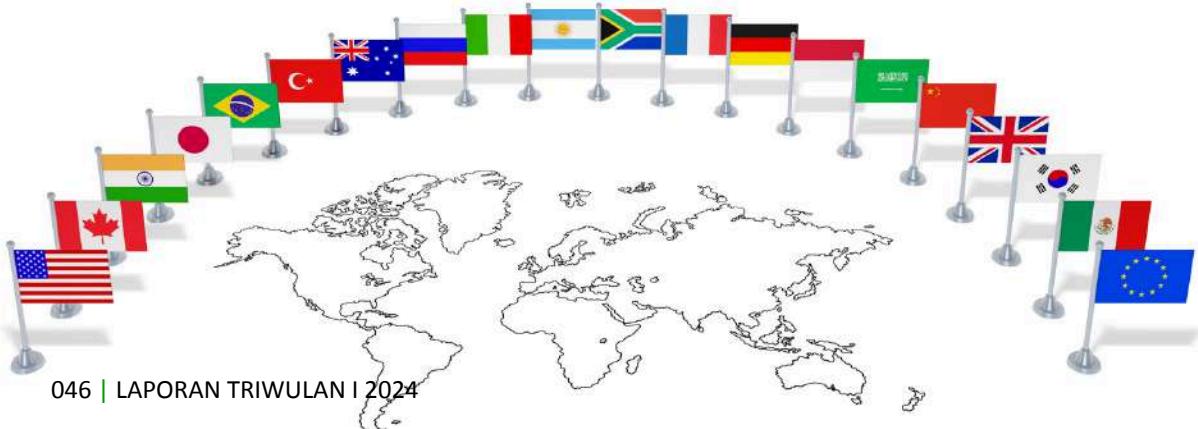
Komite TBT (Technical Barriers to Trade)

Pada pertemuan TBT WTO yang diselenggarakan pada 7-10 Maret 2023, Indonesia telah mengangkat 5 Specific Trade Concerns (STC) isu Offensif kepada negara-negara mitra, diantaranya:

- European Union-Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056
- India-Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order 2022
- India-Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances (ID 630)
- European Union-Draft Commission Regulation as Regard Maximum Residu Levels for Clothianidin and Thiamethoxam
- India-Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles

Selain itu, terdapat 2 kebijakan Indonesia yang diangkat sebagai STCs oleh beberapa negara mitra, sebagai berikut:

- PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (diajukan oleh AS, EU, dan Kanada).
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (diajukan oleh AS, EU, Kanada, Swiss, Australia, dan Selandia Baru).



Komite SPS (Sanitary and Phytosanitary) Dispute Settlement Body (DSB) WTO

Komite ini menangani non-tariff measures (NTMs) yang berkaitan dengan Persyaratan Sanitasi dalam rangka melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Direktorat Perundingan Organisasai Perdagangan Dunia telah aktif mengikuti pertemuan Sidang Regular Komite Sanitary and Phtosanitary (SPS) WTO ke-85. Pada pertemuan Reguler Komite Sanitary and Phytosanitary (SPS) WTO ke-85 yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 -24 Maret 2023, Indonesia menyampaikan respon terhadap specific trade concerns (STC) dari Uni Eropa dan Rusia terkait approval procedures for animal and plant products.

Komite CTG (Council for Trade in Goods)

Pada pertemuan CTG WTO yang diselenggarakan pada tanggal 3-4 April 2023, Indonesia telah mengangkat 4 (empat) isu Specific Trade Concerns (STC) ofensif kepada sejumlah negara mitra, yang telah atau terindikasi dapat menghambat ekspor produk Indonesia. Keempat STC ofensif tersebut, yakni :

- India - Import Policies on Tyres
- Inggris - UK Environmental Act: Forest Risk Commodities
- Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
- Uni Eropa - Deforestation-Free Commodities (DFC)

Sementara itu, 2 (dua) isu STC defensif Indonesia, yakni:

- Indonesia - Import and Export Restricting Policies and Practices
- Indonesia - Commodity Balance Mechanism

Ditjen PPI c.q Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berkontribusi aktif dalam menanyakan klarifikasi kepada Uni Eropa (UE) terkait pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk stainless steel cold-rolled flat products asal Indonesia melalui konsultasi dalam kerangka sistem penyelesaian sengketa WTO dalam kasus DS616: European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel and Cold-Rolled Flat Products from Indonesia pada tanggal 13 Maret 2023 di Kantor WTO, Jenewa, Swiss.

Pemerintah Indonesia juga berperan aktif dalam menghadiri Pertemuan Reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk menyampaikan mata agenda laporan status (status report) implementasi kasus DS477/DS478: Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products sesuai dengan keputuan dan rekomendasi DSB dan dukungan terhadap proposal penunjukan anggota Appellate Body (AB). Pemri juga terlibat aktif dalam mengikuti diskusi informal dengan Anggota WTO guna membahas reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO sebagai tindak lanjut atas komitmen yang telah disepakati bersama dalam Outcome Document KTM ke-12.



Indikator Kinerja Program 3: Kesepakatan Perundingan Jasa di Forum Internasional

Indikator Kinerja ketiga (IK-3) merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan kontribusi dari Ditjen PPI dalam membuka akses perdagangan jasa di pasar internasional. Pembukaan akses perdagangan tersebut mencakup perjanjian perdagangan jasa yang telah disepakati di berbagai forum perundingan perdagangan internasional, termasuk di dalamnya kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian perdagangan jasa tersebut dapat berupa perjanjian perdagangan yang berdiri sendiri atau kesepakatan perdagangan jasa yang merupakan bagian (salah satu klausul) dari perjanjian perdagangan FTA/CEPA.



Berdasarkan Perkin tahun 2024 Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa memiliki target kinerja 3 (tiga) perundingan di sektor jasa untuk diselesaikan. Sampai dengan triwulan I, DPPJ masih mengupayakan penyelesaian perundingan perjanjian di sektor jasa agar dapat mencapai target tahunan tersebut. Untuk perundingan tahun 2024, DPPJ berfokus pada 3 (tiga) perundingan yang masih berjalan dan diharapkan dapat diselesaikan secara substansi maupun ditandatangani di tahun 2024, antara lain : 1) Indonesia EU CEPA - Working Group on Trade in Services (WGTIS), 2) Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU-FTA) - Working Group on Electronic Commerce (WGEC); dan 3) ASEAN-China Free Trade Agreement - Working Group on Digital Economy (ACFTA WGDE). Selain itu terdapat 1 perundingan yang telah selesai secara substansi di tahun 2023 dan ditargetkan akan ditandatangani pada tahun 2024 yaitu Protokol Perubahan Indonesia Jepang EPA.

Tabel realisasi dan capaian indikator kesepakatan perundingan jasa di forum internasional beserta penjelasan perundingan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

INDIKATOR : Kesepakatan perundingan jasa di forum internasional					
Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	0	0	3	0	0

Sumber: Ditjen PPI (2024)

INDONESIA-JEPANG EPA (PROTOKOL PERUBAHAN IJEPKA)

Indonesia dan Jepang melakukan pertemuan Chief Negotiator pada tanggal 28 Agustus 2023 yang menyepakati secara substansi draft teks Chapter on E-commerce. Selanjutnya dilakukan proses legal scrubbing atas keseluruhan teks yang telah disepakati. Kesepakatan terkait e-commerce ini merupakan kesepakatan internasional di bidang e-commerce/digital trade ketiga yang dimiliki Indonesia dalam perundingan bilateral dengan Negara Mitra setelah Indonesia Australia CEPA dan Indonesia UAE CEPA.

Pada pertemuan Chief Negotiator terkait dengan perundingan akses pasar Indonesia memberikan offer di bidang real estate kepada Jepang dengan maksimal partisipasi modal asing sebesar 51%. Sebagai timbal balik, Jepang juga akan memberikan program capacity building di bidang yang sama. Adapun Jepang memberikan akses pasar terkait dengan Moda 4 pada jasa perbankan. Penandatanganan Protokol Perubahan IJEPKA direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2024.



INDONESIA-EURASIAN ECONOMIC UNION FREE TRADE AGREEMENT -WORKING GROUP ON ELECTRONIC COMMERCE

Perundingan putaran keempat WGEC IEAEU FTA telah dilaksanakan pada tanggal 18-19 Maret 2024 di Armenia. Pada perundingan tersebut berhasil disepakati empat artikel, yaitu Article Scope, Electronic Contracts, Unsolicited Commercial Electronic Messages, dan Cooperation; sehingga secara keseluruhan hingga putaran keempat, kedua pihak telah berhasil menyepakati enam artikel. Perundingan juga dapat menyepakati Para 4 Article Electronic Authentication and Electronic Signature, Para 2 dan Para 4 chapeau dan sub-para 4(c) dan (d) Article Personal Data Protection, definisi unsolicited commercial electronic messages, dan judul Article Consumer Protection.

Indonesia mengusulkan perubahan judul Working Group on Electronic Commerce menjadi Sub-Committee on Electronic Commerce, dengan pertimbangan bahwa secara struktur terdapat joint committee sehingga lebih tepat apabila diubah menjadi sub-committee. Pembahasan Article Contact Point, Sub-Committee on Electronic Commerce, dan Consultation akan dilakukan setelah terdapat kejelasan mengenai struktur secara keseluruhan termasuk perkembangan di working group lainnya. Selanjutnya, kedua pihak sepakat akan melaksanakan pertemuan intersesi secara daring pada pertengahan Mei 2024.



ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT - WORKING GROUP ON DIGITAL ECONOMY

Pertemuan Ke-6 ACFTA WGDE telah dilaksanakan pada 29 Januari – 2 Februari 2024 di Hangzhou, China, back-to-back dengan Pertemuan Ke-5 ACFTA 3.0 Upgrade Negotiations. Pertemuan didahului dengan ASEAN Caucus pada 29 – 30 Januari 2024 dan dilanjutkan dengan sesi plenary tanggal 31 Januari – 2 Februari 2024. Pokok-pokok pembahasan pertemuan sebagai berikut.

ASEAN Caucus, 29-30 Januari 2024

- Pertemuan membahas secara khusus 15 pasal dari keseluruhan 30 pasal yang diusulkan China. Lebih lanjut, AMS juga membahas 4 pasal baru usulan Singapura dan 1 pasal baru usulan Thailand.
- Pertemuan berhasil mendapatkan konsensus untuk 5 pasal, yaitu Unsolicited Commercial Electronic Messages, Logistics, MSMEs, Domestic Electronic Transactions Framework, dan Cybersecurity; untuk kemudian disampaikan kepada pihak China.

Plenary, 31 Januari – 2 Februari 2024

- Selain menyepakati 5 pasal dimaksud di atas, pertemuan plenary juga menyepakati penggabungan pasal Data Innovation dan Big Data, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 29 pasal. Hingga pertemuan ke-6, WGDE telah menyepakati 7 (tujuh) pasal, atau sekitar 24% penyelesaian pembahasan

Co-Chair WGDE dan WG on Competition and Consumer Protection (WGCC) juga membahas kemungkinan memindahkan pembahasan Pasal Online Consumer Protection ke WGCC. Saat ini WGDE dapat menerima usulan dimaksud, sementara WGCC masih membutuhkan konfirmasi Myanmar untuk usulan ini. Jika disepakati, maka jumlah pasal pada chapter Digital Economy menjadi 28, dengan 25% penyelesaian pembahasan.

Pada putaran ke-6 ini, China juga memfasilitasi site-visit pada tanggal 30 Januari 2024 ke Geely Holding Group dan Alibaba. Kunjungan ditujukan guna memaparkan potensi dan perkembangan ekonomi digital serta efisiensi rantai pasok di ruang lingkup regional.

Pertemuan ke-7 direncanakan dilaksanakan secara daring pada 18 – 21 Maret 2024; dan pertemuan ke-8 akan dilaksanakan pada 22 – 26 April 2024 secara fisik di Singapura atau ASEAN Secretariat.



INDONESIA EUROPEAN UNION CEPA - WORKING GROUP TRADE IN SERVICES

Perundingan putaran ke-17 dilaksanakan pada tanggal 26 Februari - 1 Maret 2024 dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut

- Section Domestic Regulation

Indonesia mempertahankan usulan mengenai pengecualian performance requirements (PR) dari section Domestic Regulation dengan pertimbangan tantangan untuk mengidentifikasi peraturan sektor jasa yang tidak sejalan dengan disiplin PR. Adapun EU menanyakan keterkaitan kedua hal tersebut dan meminta Indonesia untuk menyampaikan informasi mengenai persyaratan PR yang terkait dengan domestic regulation.

- Section Delivery Services

Kedua pihak mempertahankan posisi pada pasal universal service funding yang merujuk peraturan domestik masing-masing. Indonesia menyampaikan fleksibilitas penerimaan usulan EU pada cakupan pasal prevention of market distortive practices dengan usulan penambahan mekanisme joint determination sebagai prosedur tambahan pemberlakuan cakupan dimaksud. Indonesia akan melanjutkan konsultasi internal dengan Working Group on Legal and Institutional Issues terkait usulan mekanisme tersebut.

- Teks Understanding on Computer Services (CRS) dan Articile Mutual Recognition of Professional Ouaiifications

Indonesia dan EU menyetujui keseluruhan teks pada isu CRS dan pasal Mutual Recognition of Professional Ouaiification.

- Chapter Temporarv Presence of Natural Persons for Business Purposes

Kedua pihak menyetujui definisi trainee employee dan instaliers andmaintainers, serta penggunaan terminologi kategori "short-term business visitors".

- Section International Maritime Transport Services

Kedua pihak melanjutkan pembahasan terkait isu reposition of empty containers, namun terdapat perbedaan peraturan domestik yang signifikan, sehingga belum dapat dicapai kesepakatan isu ini.

- Terkait Akses Pasar, Kedua pihak fokus membahas revised offer (RO) yang dipertukarkan sebelum putaran ke-17.

- Terkait Akses Pasar Moda 4, Kedua pihak akan melanjutkan konsultasi internal mengenai hal-hal:

- i) Indonesia akan menyesuaikan reservasi terkait economic need test dengan komitmen Indonesia di GATS;
- ii) Indonesia akan meninjau kembali cakupan aktivitas kategori short-term business visitors]
- iii) Indonesia akan memodifikasi reservasi manajer untuk jasa keuangan; dan
- iv) EU akan meninjau kembali komitmen Contractual Service Suppliers dan Independent Professional berdasarkan request list of occupations dari Indonesia

TANTANGAN PEMBUKAAN AKSES PASAR SEKTOR JASA

1

Dalam rangka percepatan pembukaan akses pasar sektor jasa, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi.

2

Pertama, masih adanya gap pemahaman antara pelaku industri dan pengampu sektor jasa dalam hal penyediaan jasa secara internasional.

3

Kedua, dinamika atau perubahan kebijakan/regulasi domestik. Pengembangan sektor jasa sangat membutuhkan ekosistem yang stabil sehingga pelaku usaha juga dapat memiliki kepastian dalam mengembangkan bisnisnya termasuk melalui investasi.

PENGEMBANGAN PERDAGANGAN SEKTOR JASA

INFRASTRUKTUR KELEMBAGAAN PERDAGANGAN JASA

Indonesia perlu memiliki aturan yang dapat menjamin terjadinya transaksi perdagangan jasa yang efektif dan efisien, yang menjamin property rights, standardized services, keselamatan konsumen, public welfare, inklusif consumers, kedaulatan bangsa, dan keamanan negara.

MARKET COMPETITION

Pengembangan Perdagangan Jasa perlu memperhatikan kompetisi pasar yang berkesinambungan, mengingat bahwa sektor jasa sangat rentan terhadap potensi monopoli karena karakteristiknya yang intangible.

NATIONAL SOVEREIGNTY

Pengembangan perdagangan sektor jasa harus tetap menjaga kedaulatan bangsa, di mana peran pemerintah harus mampu memantau praktik-praktek bisnis dalam perdagangan jasa.

INNOVATION AND CREATIVITY

Pengembangan Perdagangan Jasa menyangkut strategi pengaturan aliran informasi dan aliran ide dan pengetahuan dari setiap individu. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk menjaga kebebasan mobilitas informasi yang mampu menumbuhkan inovasi dan kreatifitas pada para pelaku ekonomi.

SMALL AND MEDIUM SHAREHOLDER EXISTENCES

Pengembangan perdagangan jasa harus memperhatikan kesinambungan pertumbuhan Small Medium Enterprises yang merupakan backbones perekonomian negara. Local SME harus diberi ruang untuk masuk ke dalam rantai MNEs.

PRIVACY

Pengembangan perdagangan jasa tetap harus mempertahankan privacy dari para pelaku ekonomi, dan keamanan data pribadi dari setiap pelaku perdagangan jasa, termasuk informasi yang menyangkut hak kekayaan intelektual.

Sasaran Program 2

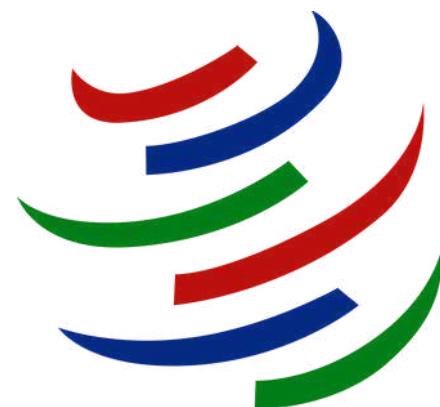
Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia

Indikator Kinerja Program 4: **Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra**

Pengukuran kinerja diplomasi Indonesia pada Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dalam mengamankan kepentingan nasional di forum internasional tertuang pada indikator kinerja ke empat (IK-4). Pengamanan kebijakan perdagangan ini sebagai upaya memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO berdasarkan UU No 7/1994. Pengamanan kebijakan nasional mencakup semua kegiatan klarifikasi yang dilakukan Indonesia baik defensif maupun ofensif.

Klarifikasi yang bersifat defensif mencakup klarifikasi tanpa sanggahan dan klarifikasi yang masih mendapat sanggahan dari negara mitra terkait dengan kebijakan domestik. Sementara itu, klarifikasi yang bersifat offensif mencakup permintaan klarifikasi yang diajukan oleh Ditjen PPI kepada negara mitra terkait dengan kebijakan domestik yang diterapkan di negara mitra yang diperkirakan dapat berpengaruh negatif terhadap perdagangan Indonesia dengan negara mitra.

Formulasi penghitungan indikator kinerja ke empat (IK-4) yang menunjukkan upaya Indonesia untuk mengamankan kepentingan dalam negeri dan kebijakan peningkatan ekspor yaitu:



$$IK - 4_t = \frac{\sum PC_{jt}}{\sum PI_{jt}} \times 100$$

- $IK - 4_t$ = Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra
- PC_{jt} = *Concern* negara mitra yang telah direspon dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan
- PI_{jt} = *Concern* negara mitra yang diterima dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan.

Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 4

INDIKATOR : Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra (%)					
Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	40	50	80	20	25

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional. Data ini diperoleh dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan. Semakin besar kepentingan nasional yang dapat diperjuangkan, tidak hanya memberikan kemungkinan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi negara mitra dagang.

Sampai dengan triwulan I 2024, klarifikasi yang telah dilakukan oleh Ditjen PPI terhadap negara yang mempertanyakan kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra adalah sebagai berikut.



Tabel 10. Perkembangan Sengketa yang dihadapi Indonesia

No	Kasus	Perkembangan
1	DS592 - Indonesia measures relating to raw materials. EU menganggap kebijakan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri inkonsisten dengan aturan WTO	Pada 8 Desember 2022, Indonesia telah mengajukan banding ke Appellate Body (AB) WTO
2	DS593 - EU certain measures concerning palm oil and oil palm crop based biofuels. Indonesia melayangkan 22 klaim gugatan terhadap kebijakan EU dan menuduh kebijakan EU diskriminatif, restriktif, hambatan teknis perdagangan, serta kebijakan pajak Prancis merupakan subsidi	Pada Maret 2024, sudah dilakukan sirkulasi panel report kepada Members
3	DS616: EU – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia. Uni Eropa mengenakan Bea Masuk Imbalan sebesar 13,5 – 21,4 % dan Bea Masuk Anti Dumping sebesar 9,3 – 20,2% terhadap baja Indonesia, yang dituduh menerima subsidi lintas negara (transnasional subsidy) serta menyediakan nikel dan lahan di bawah nilai kelayakan (less than adequate remuneration)	November 2023 (1st written submission) FWS Indonesia, Desember 2023 (1st written submission) FWS EU.
4	DS618: EU – Countervailing duties on imports of biodiesel from Indonesia. EU menuduh adanya kontribusi finansial kepada industri biodiesel nasional melalui hibah dari BPDPKS dan penyediaan CPO dibawah harga remunerasi.	20 Februari 2024, telah disepakati komposisi panel.
5	DS622: EU – Anti Dumping Measures on Imports of Fatty Acid from Indonesia. EU mempersempit cakupan produk dalam penyelidikan dan keliru dalam merespon penarikan permohonan oleh petisioner. EU keliru dalam menentukan injury dan metode penghitungan normal value & export price.	7 Februari 2024, Indonesia mengajukan permohonan konsultasi (request for consultations)

Indikator Kinerja Program 5:

Percentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional

Indikator Kinerja kelima (IK-5) merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan Ditjen PPI dalam memperjuangkan proposal Indonesia hingga menjadi bagian dalam sebuah kesepakatan atau deklarasi dibeberapa forum internasional. Indikator ini diukur dengan menghitung besaran persentase proposal Indonesia yang diterima dan menjadi bagian dari kesepakatan atau deklarasi. Dalam hal ini kesepakatan atau deklarasi yang menjadi perjanjian kinerja Ditjen PPI adalah kesepakatan atau deklarasi yang diajukan terutama oleh Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah dokumen deklarasi dan dokumen kesepakatan perundingan. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara proposal Indonesia yang telah diterima dengan proposal yang diajukan oleh Indonesia sampai dengan triwulan I tahun 2024, dengan rumus sebagai berikut:

$$DCt = \frac{\sum AP_{it}}{\sum IP_{it}} \times 100$$

DCt = Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement/proposa l di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan

AP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan

IP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan

Pada TW I 2024, Ditjen PPI melalui Direktorat Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah berupaya untuk memperjuangkan yang mencerminkan kepentingan Indonesia menjadi bagian dari kesepakatan di fora Antar Kawasan dan Organisasi Internasional lainnya dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

INDIKATOR : Percentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)					
Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	25	31,25	80	-	-

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Apabila dibandingkan dengan realisasi TW I tahun 2023, terjadi peningkatan pada realisasi TW I tahun 2024 di mana pada TW I 2023 realisasi IK-5 sebesar 25 persen sedangkan pada TW I 2024 belum dapat tercapai. Penurunan realisasi ini dikarenakan belum banyaknya pertemuan forum internasional yang menghasilkan sebuah deklarasi atau joint statement.

Sementara itu upaya untuk dapat memberikan kontribusi diterimanya proposal ataupun deklarasi/statement kepentingan Indonesia yang diajukan untuk menjadi bagian dari kesepakatan di fora Antar Kawasan dan Organisasi Internasional masih terus dilakukan. Secara lebih detil kesepakatan atau deklarasi yang diperjuangkan tersebut antara lain:

Hingga triwulan I 2024 Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, telah berhasil menandatangani International Coffee Agreement 2022 (ICA 2022) dan saat ini sedang dalam proses ratifikasi untuk akhirnya diimplementasi. ICA merupakan perjanjian multilateral antara pemerintah yang mewakili negara-negara penghasil kopi dan konsumen kopi. Keterlibatan Indonesia dalam perundingan ICA 2022 berkontribusi pada industri kopi dunia secara menyeluruh. Indonesia berhasil memperjuangkan kepentingan sektor kopi nasional dengan menambahkan "premixed coffee" pada definisi kopi di ICA 2022. Hal ini secara tidak langsung menjadi pencapaian Indonesia dalam industri kopi dunia dan kehidupan para petani lokal. Pencapaian penting lainnya adalah penekanan pada keberlanjutan sektor kopi pada tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, serta lingkungan secara berimbang dan terintegrasi untuk keberlanjutan sektor kopi Indonesia dan juga dunia. Perjanjian ini mulai berlaku ketika dua pertiga dari negara anggota eksportir dan importir telah mendeposito.





Asia-Pacific Economic Cooperation

APEC 2024 Peru “Empower, Include, Grow”

APEC merupakan forum kerja sama ekonomi antar 21 Ekonomi di kawasan Asia Pasifik. APEC berperan sebagai inkubator ide isu-isu perdagangan dan kerja sama ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran bagi anggotanya.

Peru selaku Tuan Rumah APEC 2024 mengangkat tema “***Empower, Include, Grow***” dengan **3 (tiga) prioritas utama** yaitu:

Trade and investment for inclusive and interconnected growth

Innovation and digitalization to promote transition to the formal and global economy

Sustainable growth for resilient development, which seeks to promote energy transition

APEC Committee on Trade and Investment 2024 (APEC CTI1)

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) sebagai instansi penjuru nasional pada perundingan CTI berperan dalam perundingan dan kerja sama akses dan fasilitasi perdagangan dan investasi di fora CTI maupun sub-fora di bawah CTI yaitu Business Mobility Group (BMG), Digital Economy Steering Group (DESG), Group on Services (GOS), Investement Experts Group (IEG), Intellectual Property Rights Experts Group (IPEG), Market Access Group (MAG), Sub-Committee on Standards and Conformance (SCSC), dan Sub-Committee on Customs Procedures (SCCP) yang diampu oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Pada TW I 2024, DPAKOI berpartisipasi aktif dalam pertemuan APEC First Committee on Trade and Investment (CTI1) diselenggarakan pada 4-5 Maret 2024 di Lima, Peru. Pertemuan ini mengawali keketuaan Peru 2024 yang mengangkat tema "Empower, Include, Grow". Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut perkembangan program kerja CTI terkait prioritas APEC 2024, antara lain tindak lanjut San Francisco Principles sebagai salah satu capaian keketuaan Amerika Serikat tahun 2023, hasil KTM WTO ke-13, pengesahan beberapa Term of Reference (TOR), proposal baru terkait upaya digitalisasi perdagangan dan rantai pasok, perkembangan implementasi proposal lainnya yang sedang berjalan, serta kesepakatan sembilan laporan sub-fora di bawah CTI.

Pada pembahasan agenda Regional Economic Integration (REI) Indonesia juga menyampaikan paparan perkembangan implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) berupa pembentukan RCEP Support Unit (RSU),

dukungan Subsidiary Bodies (SBs) terhadap RCEP Joint Committee (RJC) untuk mengintensifkan implementasi RCEP, Economic and Technical Cooperation (ECOTECH), dan prosedur aksesi.

Salah satu deliverables Peru sebagai tuan rumah APECC tahun 2024 adalah visi baru Free Trade Area of Asia-Pacific (FTAAP) yang tertuang dalam sebuah standalone statement. Untuk mendorong pembahasan FTAAP, Peru menginisiasi CTI-FTAAP Dialogue yang dilaksanakan pada setiap rangkaian Senior Officials Meeting (SOM) sepanjang 2024. Dialog pertama telah diadakan pada 3 Maret 2024.

APEC Business Advisory Council (ABAC) selaku perwakilan pelaku usaha yang menginisiasi pembentukan FTAAP memberikan beberapa rekomendasi, antara lain identifikasi hambatan pemanfaatan FTA, penguatan fungsi sekretariat FTA, pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa, dan pemanfaatan inisiatif integrasi ekonomi di APEC.

Peru juga menyampaikan rencana pertemuan bersama Menteri Perdagangan dengan Menteri terkait Perempuan dan Ekonomi yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2024 di Arequipa, Peru. Dalam pertemuan tersebut akan dibahas mengenai perdagangan dan pemberdayaan perempuan serta bagaimana APEC dapat berkontribusi pada pilar perdagangan dan inklusi dalam prioritas CTI tahun ini. Pertemuan ditargetkan menyepakati Pernyataan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri terkait Perempuan dan Ekonomi.

APEC Market Access Group 2024 (APEC MAG1)



Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) juga merupakan instansi penjuru nasional untuk perundingan kelompok kerja akses pasar (Market Access Group/MAG) di bawah CTI. Pertemuan ke-66 MAG di Tahun 2024 dilaksanakan pada rangkaian APEC First Senior Officials Meeting (SOM1) pada tanggal 28 Februari 2024 di Lima, Peru. Pertemuan mendiskusikan inisiatif yang berperan penting dalam mendukung sistem perdagangan multilateral, melanjutkan mandat menteri untuk menyelesaikan pembahasan APEC Environmental Goods List (EGs), dan langkah-langkah untuk meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan. Selain itu prioritas CTI untuk MAG termasuk dukungan sistem perdagangan multilateral (MTS) melalui monitoring implementasi WTO TFA dan WTO ITA dan upaya peningkatan utilisasi database APEC Trade Repository, serta isu akses pasar kawasan lainnya seperti rantai pasok, transparansi dan produk remanufaktur.

Dalam upaya mendukung sistem perdagangan multilateral Indonesia telah menyampaikan perkembangan implementasi WTO Trade Facilitation Agreement (TFA), di mana Indonesia telah meluncurkan situs web Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) dengan sistem enquiry point. Selain itu dalam upaya meningkatkan integrasi ekonomi regional, Indonesia juga menyampaikan dukungan serta mendorong peningkatan promosi dan penggunaan APEC Trade Repository (APECTR) melalui berbagai materi promosi, seperti infografis dan video infografis. Indonesia menegaskan bahwa melalui optimalisasi pemanfaatan APECTR diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.



Presidensi G20 Brazil 2024

Building a Just World and a Sustainable Plane

Pertemuan pertama G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) Brazil 2024 dilaksanakan secara virtual membahas 3 (tiga) isu prioritas yaitu (1) Trade and Sustainable Development; (2) Sustainable Development in Investment Agreement; dan (3) Women in International Trade. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) sebagai salah satu instansi penjuru nasional G20 TIWG telah menghadiri pertemuan virtual TIWG 1 pada tanggal 29-30 Januari 2024. Aspek-aspek kepentingan perdagangan Indonesia yang akan diperjuangkan pada Presidensi G20 Brazil 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong perdagangan dan pembangunan keberlanjutan yang selaras dengan UNFCCC dan Paris Agreement, memastikan kebijakan terkait iklim dan lingkungan tidak menjadi hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan, optimalisasi diskusi di forum WTO, dan implementasi penuh WTO Trade Facilitation Agreement (TFA).
2. Mengangkat peningkatan peran wanita dan UMKM dalam perdagangan internasional dengan mengurangi biaya perdagangan melalui implementasi WTO TFA, program peningkatan kapasitas, peningkatan akses finansial, informasi dan teknologi termasuk literasi digital untuk memenuhi standar-standar internasional.

Isu prioritas 1 - Trade and Sustainable Development

Indonesia mendorong kepentingan negara berkembang untuk memastikan tindakan unilateral menggunakan isu lingkungan tidak menjadi hambatan perdagangan

Isu prioritas 3 - Women in International Trade

Indonesia mendorong peningkatan peran wanita dalam perdagangan global melalui technical assistance dan capacity building terutama akses finansial dan professional network

TIMM Statement

Refleksi kepentingan perdagangan Indonesia pada deklarasi tingkat Menteri G20

Leaders' Declaration

Refleksi kepentingan perdagangan Indonesia pada deklarasi tingkat Pemimpin Negara G20

Sasaran Program 3

Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional dengan negara mitra FTA

Indikator Kinerja Program 6:

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani

Indikator implementasi hasil perundingan perdagangan internasional melalui proses ratifikasi dikatakan telah tercapai apabila Kementerian Perdagangan dalam hal ini Ditjen PPI telah menyampaikan atau melimpahkan berkas atas perjanjian yang akan diproses ratifikasi kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara operasional, beberapa tahap yang ditempuh sebelum pelimpahan dokumen ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinyatakan dalam diagram alur yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi

Adapun proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun berjalan dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan. Indikator pencapaian 100 persen dari alur pelimpahan tersebut berada pada tahap penyampaian Izin Prakarsa Ratifikasi dan dokumen hasil pembahasan ratifikasi Persetujuan di DPR. yang mencakup naskah translasi perjanjian, naskah akademik, analisa SWOT, dan sebagainya yang memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan pelaksanaan.

Mekanisme perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$R_t = \frac{\sum D_t}{\sum A_t} \times 100$$

R_t = Persentase dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan

D_t = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan

A_t = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diratifikasi di tahun berjalan

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani (%)					
Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
100	0	0	100	0	0

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Pada tahun 2024, selain memiliki target penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani, Ditjen PPI juga memiliki target penyelesaian ratifikasi sampai terbitnya Undang-Undang atau Perpres terkait dengan kerja sama perdagangan tersebut.	Target yang ditetapkan oleh Ditjen PPI untuk penyelesaian dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani pada tahun 2024 adalah 100 persen. Target ini masih sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023.
Pada triwulan I tahun 2024, Ditjen PPI belum berhasil menyelesaikan ratifikasi atau melimpahkan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani dikarenakan masih adanya proses yang perlu diselesaikan sebelum dokumen dapat dilimpahkan ke instansi yang menangani.	Meskipun demikian capaian pada indikator ini belum dapat diperhitungkan karena perjanjian yang telah ditandatangani masih pada tahap penyusunan dokumen ratifikasi dan belum dilimpahkan kepada instansi yang menangani. Adapun untuk progres ratifikasi perjanjian perdagangan yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Perjanjian	Proses Ratifikasi
1	Protocol to Amend Indonesia - Chile CEPA in Trade in Services (IC-CEPA TIS)	Permintaan paraf K/L PAK menuju proses harmonisasi
2	International Coconut Community dan Host Country Agreement ICC	Telah menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan > penerbitan PAK
3	International Coffee Agreement (ICA 2022)	Telah menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan
4	Asian and Pacific Coconut Community (APCC)	Telah menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan
5	Indonesia - Malaysia Border Trade Agreement (IM-BTA)	Telah menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan

INDONESIA-CHILE CEPA (TIS)

Penandatanganan Protocol to Amend the Comprehensive Economic Partnership Agreement of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile for the Incorporation of Provisions on Trade in Services dilakukan pada tanggal 21 November 2022 oleh Menteri Perdagangan RI dan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Internasional Chile. Saat ini proses ratifikasi telah sampai pada tahap penyusunan dokumen ratifikasi untuk diajukan kepada DPR.

Pada tanggal 13 April 2023, DPPJ bersama Sekretariat Ditjen PPI menyelenggarakan rapat penyusunan dokumen ratifikasi dengan melibatkan Kementerian atau Lembaga terkait untuk membahas draft naskah penjelasan. Ratifikasi ditargetkan selesai pada tahun ini agar segera dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Perjanjian perdagangan Jasa dalam kerangka IC-CEPA akan memperkuat dan memperdalam

kerja sama ekonomi yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Chile melalui peluang akses pasar jasa yang sangat berarti. Perdagangan Jasa antara kedua negara mencakup hubungan ekonomi yang lebih luas dan dapat mendorong pada peningkatan kesejahteraan ekonomi Indonesia dan Chile. Perjanjian perdagangan jasa di bawah IC-CEPA juga dapat berfungsi sebagai penggerak arus jasa yang lebih tinggi yang akan melengkapi implementasi kesepakatan IC-CEPA yang telah diimplementasikan mulai tahun 2019. Dalam hal akses pasar jasa, penyedia jasa dalam negeri Indonesia juga akan memiliki peluang untuk dapat masuk ke pasar Chile lainnya untuk sektor jasa bisnis; jasa distribusi; jasa komunikasi; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa pendidikan; jasa lingkungan; jasa pariwisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi, dan jasa lainnya. Langkah ini akan semakin mendukung eksport Indonesia ke kawasan Amerika Latin.

Indikator Kinerja Program 7:

Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA

Indikator ini disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran “Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundungan perdagangan Indonesia dengan mitra FTA”. Implementasi perjanjian perdagangan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan disepakatinya perjanjian perdagangan. Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan akses pasar ekspor ke negara mitra. Semakin banyak pihak yang memperoleh informasi, memahami, dan mengikuti perkembangan terkini terkait perundungan perdagangan internasional maka diharapkan akan memberikan korelasi positif bagi pemanfaatan hasil negosiasi tersebut. Pelaku usaha dalam negeri dapat membuka peluang pasar dan menjalin kerja sama dengan mitra baru sehingga meningkatkan realisasi ekspor nasional.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional serta mengatasi asymmetric information,

Ditjen PPI sejak tahun 2017 memiliki Free Trade Agreement (FTA) Center. FTA Center merupakan kolaborasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, universitas yang ahli dalam perdagangan internasional dan pelaku usaha profesional yang mengerti tentang prosedur ekspor. Kegiatan yang dilaksanakan oleh FTA Center meliputi konsultasi, edukasi, dan advokasi tentang perjanjian perdagangan bebas. Para pelaku usaha yang sama sekali belum pernah melakukan ekspor dapat memperoleh pendampingan hingga dapat melakukan ekspor secara mandiri. Penyebarluasan informasi FTA oleh FTA Center diantaranya dilakukan melalui pelayanan konsultasi di kantor FTA Center, website dan coaching clinic. Setiap FTA centre memiliki tiga tenaga ahli untuk Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI), akses pembiayaan dan tata cara ekspor, serta strategi promosi dan pemasaran.

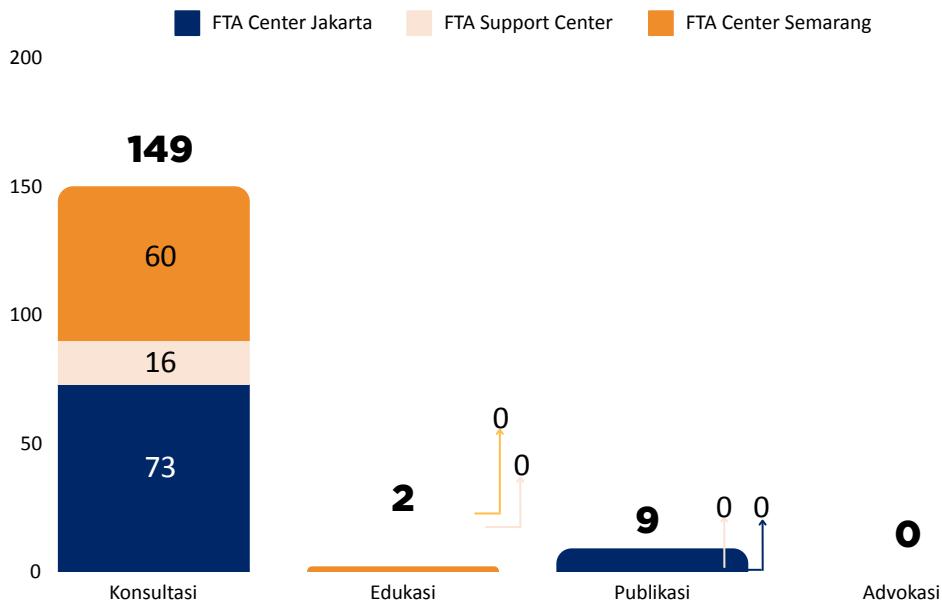
Realisasi dan capaian pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7

Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA					
Triwulan I 2023			Triwulan I 2024		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2000	630	31,5	2000	397	19,85

Sumber: Ditjen PPI (2024)

Pada triwulan I 2024, FTA Center Bandung memiliki jumlah layanan terbanyak yaitu sebesar 327 layanan (52%) dengan 56,57% topik yang paling banyak diulas adalah Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). FTA Center Jakarta menempati urutan kedua dalam jumlah pelayanan yaitu 152 layanan (24%) dan 36,18% topik terbanyak adalah akses pembiayaan dan tata cara ekspor disamping 34,21% tentang pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional. Pada urutan ketiga yang memberikan pelayanan terbanyak adalah FTA Center Semarang sebanyak 151 layanan (24%) dengan 52,32% terkait layanan akses pembiayaan dan tata cara eksport. Selain dari pada itu, apabila dilihat dari jumlah layanan FTA Center berdasarkan jenis layanannya, FTA Center memiliki total layanan sebagai berikut.

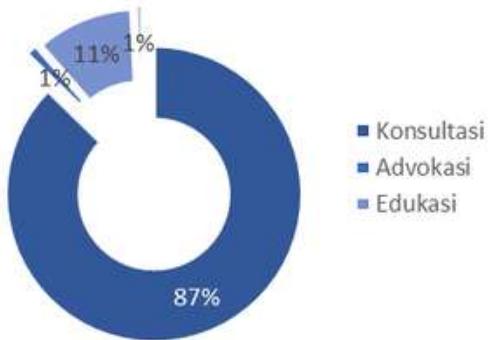


Sumber: Ditjen PPI (2024)

Gambar 3. Total Layanan FTA Center Triwulan I 2024 di Jakarta, Bandung, dan Semarang



Pada triwulan I 2024, FTA Center di tiga kota memberikan layanan sebagaimana ditunjukkan gambar berikut ini, meliputi konsultasi sebanyak 550 layanan (87,30%), advokasi sebanyak 8 layanan (1,27%), edukasi sebanyak 67 layanan (10,63%), dan publikasi sebanyak 5 layanan (1%). Jumlah total pelaku usaha yang dilayani oleh ketiga FTA Center sebanyak 287 pelaku usaha. Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) menjadi topik yang paling banyak memperoleh perhatian dari masyarakat (43,49%), selebihnya adalah terkait akses pembiayaan dan tata cara ekspor (32,70%) dan strategi promosi dan pemasaran (23,81%).

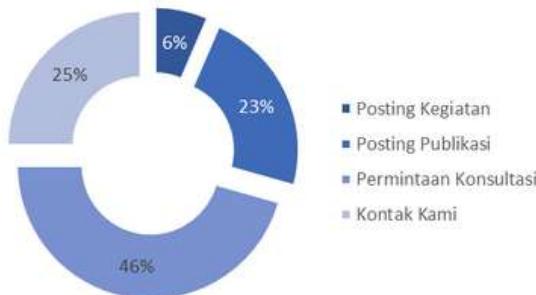


Sumber: Ditjen PPI (2024)

Gambar 4. Layanan FTA Center Triwulan I 2024

Website FTA Center

Pada triwulan I 2024, pelayanan FTA yang dilakukan melalui website sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah, sejumlah 92 layanan yang terdiri dari posting kegiatan (6%), posting publikasi (23%), permintaan konsultasi (46%) dan kontak kami (25%).



Sumber: Ditjen PPI (2024)

Gambar 5. Layanan Website FTA Center Triwulan I 2024



<https://ftacenter.kemendag.go.id/>

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp145.479.583.000,-. Realisasi anggaran yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I tahun 2024 oleh Ditjen PPI adalah Rp24.389.815.231,- atau dengan nilai capaian sebesar 16,17 persen. Realisasi anggaran Ditjen PPI triwulan I 2024 tersaji pada tabel berikut.

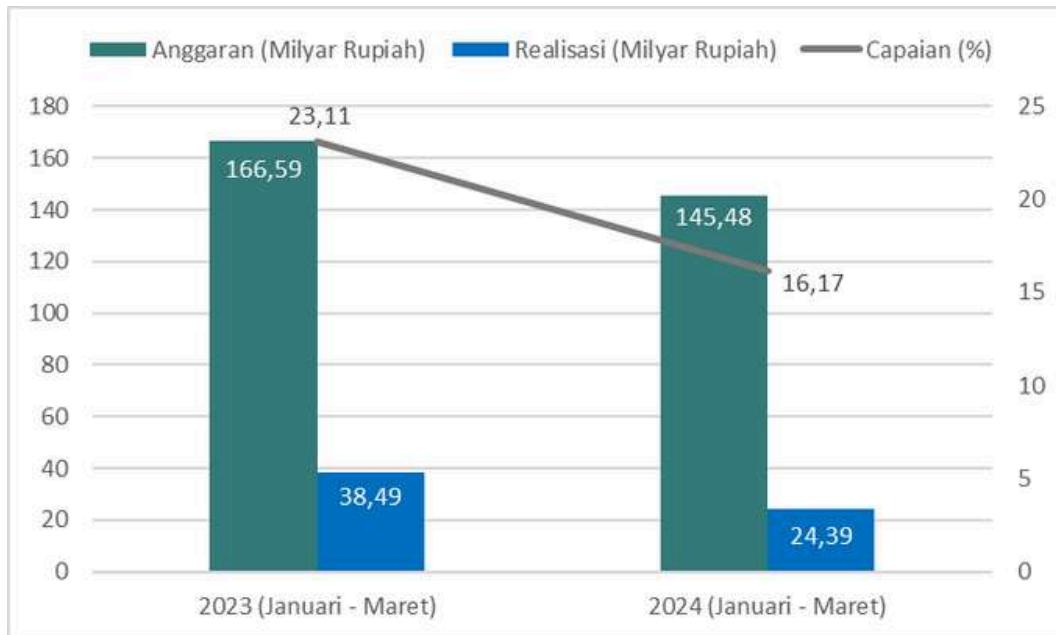
Tabel 14. Realisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan I Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi Anggaran Triwulan I	Capaian (%)
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	42.600.000.000	10.415.493.324	24,45
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	61.479.583.000	7.307.473.473	11,89
Perundingan Perdagangan Jasa	8.000.000.000	1.730.163.697	21,63
Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	7.500.000.000	1.269.894.581	16,93
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	9.200.000.000	2.030.831.781	22,07
Perundingan Perdagangan Bilateral	9.700.000.000	787.106.120	8,11
Perundingan Perdagangan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	7.000.000.000	848.852.255	12,13
Total Ditjen PPI	145.479.583.000	24.389.815.231	16,17

Sumber: Aplikasi SAKTI, diolah (2024)



Capaian tersebut menurun dari capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya di mana pada tahun 2023 Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 181.592.401.000,- yang kemudian diblokir sebesar Rp 15.000.000.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan pada triwulan I 2022 sebesar Rp 166.592.401.000,- dengan realisasi anggaran yang telah dilakukan oleh Ditjen PPI adalah Rp38.496.921.652,- atau dengan nilai capaian sebesar 38,49 persen. Penurunan capaian juga terjadi karena adanya penurunan anggaran dan beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana pada Triwulan I 2024, Data perbandingan capaian triwulan I 2023 dan 2024 tersaji pada grafik berikut.



Sumber: Aplikasi SAKTI, diolah (2024)

Gambar 6. Perbandingan Capaian Anggaran Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024



Penutup

Pada tahun 2024, dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi. Sampai dengan triwulan I 2024, progress pencapaian kinerja tujuh Indikator Kinerja Program Ditjen PPI menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Beberapa indikator yang terlihat kemajuannya antara lain penyelesaian perundungan pembukaan akses pasar, upaya penanganan hambatan non tarif, dan penyebarluasan informasi tentang peluang dan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.



KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN I 2024

1

Program kerja Ditjen PPI Kementerian Perdagangan memiliki interaksi yang cukup intensif dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Berbagai pertemuan dengan negara mitra masih dilakukan secara hybrid guna penyelesaian target perundingan

2

Belum adanya kesepakatan waktu yang spesifik pelaksanaan setiap putaran perundingan dan target penyelesaian perundingan menyebabkan proses penyelesaian perundingan relatif lebih lama atau tertunda

3

Sulitnya mencapai kesepakatan dengan negara mitra, terutama dalam hal akses pasar

4

Terdapat perbedaan kepentingan dan prioritas yang berbeda antar stakeholders sehingga berdampak pada sulitnya koordinasi penyusunan posisi runding

5

Negara mitra mengajukan isu-isu yang sensitif bagi Indonesia seperti akses pasar pengadaan pemerintah (government procurement), BUMN, Small Medium Enterprises (SME), dan pajak ekspor untuk dapat diakomodir sehingga sulit tercapai kesepakatan

UPAYA DALAM MENGEFETIFKAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN I 2024

1

Mengintensifkan perundingan yang dilakukan baik secara fisik dan virtual serta melakukan koordinasi yang intensif, membangun argumen yang mutually beneficial, serta pendekatan personal

2

Membangun komunikasi lebih intensif dengan negara mitra melalui KBRI di setiap negara untuk mendorong penentuan jadwal perundingan putaran selanjutnya

3

Menyusun prioritas dan strategi dalam grand design dan roadmap perundingan perdagangan internasional, sebagai rujukan negosiator dalam menyusun posisi Indonesia dan melakukan perundingan

4

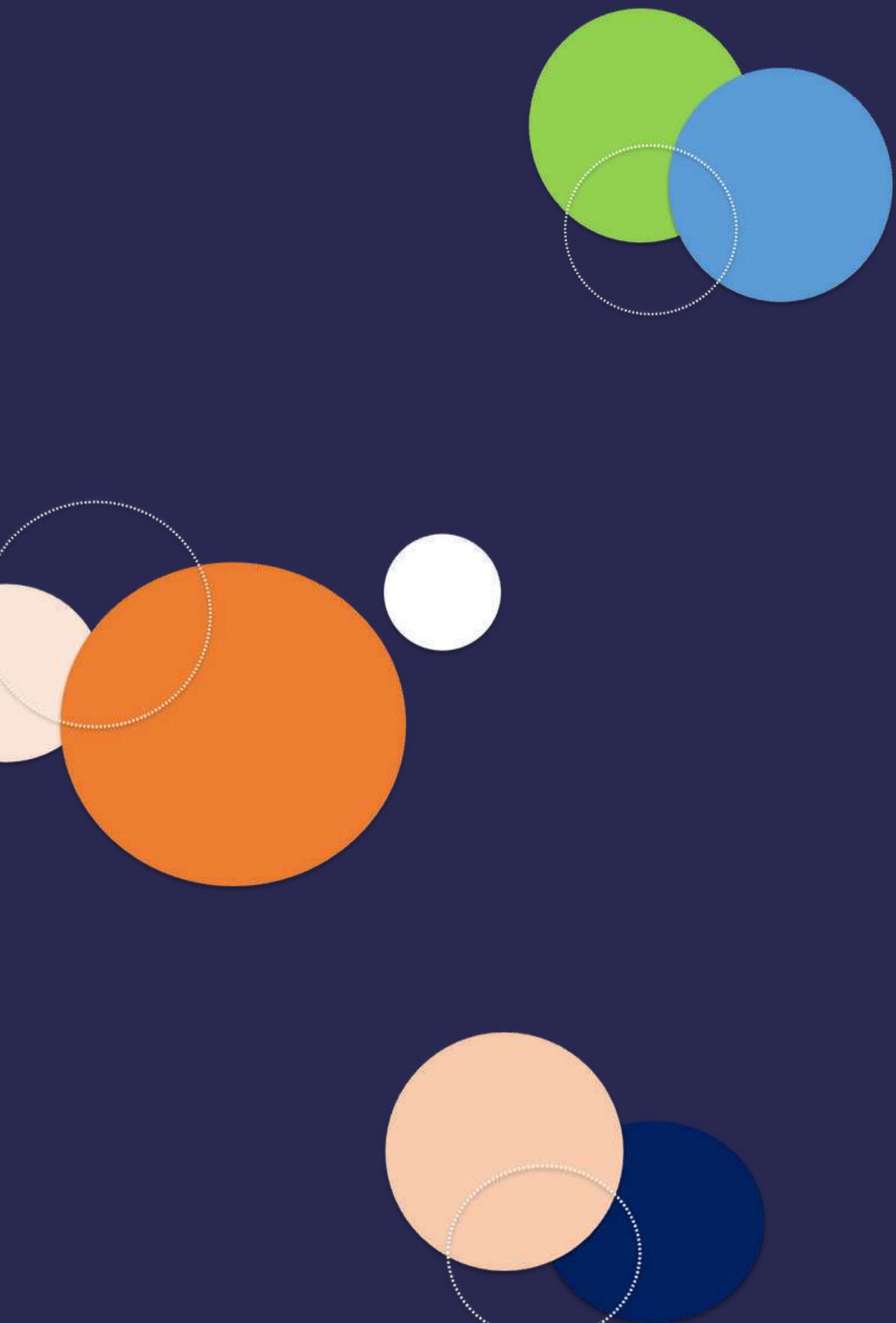
Mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai stakeholder dengan harapan penyusunan posisi runding akan lebih ideal dan menjadi titik tolak penting bagi percepatan perundingan

5

Membangun komunikasi dan berdialog secara lebih terbuka dengan negara mitra runding



LAMPIRAN



Lampiran 1
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat
Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa di pasar internasional	1 Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional	$Z_t = \frac{\sum X_{it}}{\sum X_{t1}} \times 100$ <p>Z_t = Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia di tahun berjalan X_{it} = Jumlah nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan X_{t1} = Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan</p>	Data ekspor Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS
		2 Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	$\text{Indeks NTMs}_t = \frac{\text{Weighted NTMs}_t}{\text{WeightedNTMs}_{t0}} \times 100$ $\text{Weighted NTMs}_t = \sum_j (\sum_i \text{NTMs}_{ijt} \times \text{MS}_{ij})$ $\text{Weighted NTMs}_{t0} = \sum_j (\sum_i \text{NTMs}_{ij0} \times \text{MS}_{ij})$ <p>Indeks NTMs_t = Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia WeightedNTMs_t = NTMs terbobot di tahun berjalan WeightedNTMs_{t0} = NTMs terbobot di tahun dasar atau baseline (2010) NTMs_{ij} = Jenis NTMs setiap negara mitra yang ditentukan MS_{ij} = market share ekspor Indonesia ke negara mitra yang ditentukan</p>	1. Data NTMs yang dipublikasikan pada Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP) WTO 2. Data ekspor Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS
		3 Kesepakatan Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional	$SA_t = \sum SA_{jt}$ <p>SA_t = Jumlah kesepakatan perundingan Jasa di tahun berjalan SA_{jt} = Kesepakatan perundingan perdagangan Jasa dengan negara mitra di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen kesepakatan perundingan perdagangan jasa di berbagai forum di Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Ditjen PPI
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	1 Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	$IC_t = \frac{\sum PC_{jt}}{\sum PI_{jt}} \times 100$ <p>IC_t = Persentase kebijakan nasional yang diklarifikasi di tahun berjalan PC_{jt} = Pertanyaan negara mitra yang diklarifikasi di tahun berjalan PI_{jt} = Pertanyaan negara mitra di tahun berjalan</p>	Informasi, dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan
		2 Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	$DC_t = \frac{\sum AP_{jt}}{\sum IP_{jt}} \times 100$ <p>DC_t = Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement/proposal di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan AP_{jt} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan IP_{jt} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang disampaikan dalam forum-forum perdagangan internasional dalam bentuk deklarasi/statement/ proposal dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani perundingan di forum-forum tersebut
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	1 Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	$R_t = \frac{\sum D_t}{\sum A_t} \times 100$ <p>R_t = Persentase dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan D_t = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan A_t = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diiratifikasi di tahun berjalan</p> <p>Catatan: Proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun berjalan dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani ratifikasi perjanjian perdagangan internasional
		2 Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	$E_t = \sum I_{jt}$ <p>E_t = Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan I_{jt} = Individu yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan</p>	1. Data peserta sosialisasi FTA dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang melaksanakan penyebarluasan informasi perjanjian perdagangan internasional 2. Data pelaku usaha yang melakukan konsultasi layanan di FTA Center

Lampiran 2
Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2024



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NOMOR PR.02.01/01/PPI/PERK IN/12/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Jabatan : Menteri Perdagangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

Pihak Pertama

Djatmiko Bris Witjaksono

Lampiran 3

Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2024

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM: PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional	Persentase pangsa ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara mitra yang termasuk dalam perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	46 Persen
		Indeks Non-Tarif Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	4,5 Indeks
		Jumlah kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	2 Perjanjian
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	80 Persen
		Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	80 Persen
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	100 Persen
		Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	2.000 Orang

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	90 Nilai

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Perdagangan Luar Negeri	84.000.000.000
	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	42.600.000.000
	Perundingan Perdagangan Jasa	8.000.000.000
	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	7.500.000.000
	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	9.200.000.000
	Perundingan Perdagangan Bilateral	9.700.000.000
	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	7.000.000.000
2	Program Dukungan Manajemen	61.479.583.000
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	61.479.583.000
	JUMLAH	145.479.583.000

Jakarta, 22 Desember 2023

Menteri Perdagangan

Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Djatmiko Bris Witjaksono

Lampiran 4
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Triwulan : I (Satu) Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
<i>Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional</i>	<i>Percentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional</i>	45	Persen	70,72	157,15
	<i>Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia</i>	5,0	Indeks	4,82	103,81
	<i>Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional</i>	2	Perjanjian	0	0
<i>Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yg kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia</i>	<i>Percentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra</i>	80	Persen	40	50
	<i>Percentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional</i>	80	Persen	25	31,25
<i>Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA</i>	<i>Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani</i>	100	Persen	0	0
	<i>Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA</i>	2.000	Orang	630	31,5

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Triwulan : I (Satu) Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	82.518.839.000	21.110.148.589	25,58
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	54.173.562.000	11.601.651.712	21,42
Perundingan Perdagangan Jasa	5.150.000.000	768.522.234	14,92
Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	5.150.000.000	1.677.192.575	32,57
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	7.400.000.000	784.579.368	10,60
Perundingan Perdagangan Bilateral	7.400.000.000	1.297.269.633	17,53
Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.800.000.000	1.257.557.541	26,20

Jakarta, 22 April 2024
 Direktur Jenderal
 Perundingan Perdagangan Internasional

Djatmiko Bris Witjaksono

Lampiran 5
Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional
s.d Triwulan I Tahun 2024

Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) (selanjutnya digantikan oleh ATIGA)	28 Januari 1992 30 Desember 1995 (Keppres No.85/1995)
		ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)	26 Februari 2009 17 Mei 2010 (Perpres No.2/2010)
		First Protocol to Amend The ASEAN Trade in Goods Agreement	22 Januari 2019 24 Juli 2020 (Perpres No. 84/2020)
		Protocol to Amend the Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar	28 Oktober 2010 13 Juni 2012 (Perpres No.62/2012)
		ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1995 30 Desember 1995 (Kepres No.88/1995)
		Protocol To Amend The ASEAN Framework Agreement On Services	2 September 2003 20 Desember 2004 (Perpres No.4/2004)
		Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1997 31 Maret 1998 (Kepres No.53/1998)
		Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	16 Desember 1998 13 Oktober 1999 (Kepres No.129/1999)
		Protocol to Implement the Third Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	31 Desember 2001 14 November 2003 (Kepres No.90/2003)
		Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	3 Desember 2004 31 Juli 2008 (PerpresNO.52/2008)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Fourth Package of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	23 November 2004	19 Juli 2007 (Perpres No.79/2007)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services	3 September 2004	31 Juli 2008 (Perpres No.52/2008)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 April 2008	5 Maret 2009 (Perpres No.6/2009)
		Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	8 Desember 2006	20 Januari 2010 (Keppres No.8/2010)
		Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 Mei 2011	22 Juli 2013 (Perpres No.47/2013)
		Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	19 November 2007	18 Maret 2010 (Perpres No.19/2010)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement Services	20 Maret 2015	25 Mei 2018 (UU No.4/2018)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	26 Februari 2009	5 Januari 2012 (Perpres No.1/2012)
		Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	16 Desember 2011	23 April 2014 (Perpres No.37/2014)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services	23 Juni 2016	3 November 2020 (UU No.13/2020)
		Protocol to Implement the Eighth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	28 Oktober 2010	13 Juni 2014 (Perpres No.59/2014)
		Protocol To Implement The Eight Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	20 Desember 2013	1 November 2018 (Perpres No.107/2018)
		Protocol to Implement the Ninth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	27 November 2015	14 November 2018 (Perpres No.113/2018)
		Protocol to Implement the Tenth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	11 November 2018	13 Mei 2022 Perpres No.27/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari 2023 (Perpres No.3/2023)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	MRA on Nursing Services	8 Desember 2006	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Architectural Services	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 20 April 2009
		MRA on Medical Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Dental Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		ASEAN Framework Arrangement for The Mutual Recognition of Surveying Qualifications	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Mulai berlaku setelah 3 bulan dari penandatanganan
		ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari 2023 (Perpres No.3/2023)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (ESDM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)	Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	1 Januari 2010 (Perpres No.40/2010)
		Agreement on Trade in Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (AITISA)	13 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 109/2018)
		Agreement on Investment Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asians Nations and the Republic of India (AIIA)	20 November 2014	18 Maret 2010 (Perpres No.18/2010)
		Agreement on Dispute Settlement Mechanism Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asians Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	29 April 2015 (Perpres No.51/2015)
	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	31 Maret 2008	19 November 2009 (Perpres No.50/2009)
		First protocol to amend the agreement on comprehensive economic partnership among Japan and member states of The Association of Southeast Asian Nations	2 Maret 2019	6 Oktober 2021 (Perpres No. 91/2021)
	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement (AHFTA)	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement	12 November 2017	4 Juli 2020 (Perpres No.24/2020)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)	Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	4 November 2002	15 Juni 2004 (Keppres No. 48/2004)
		Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China	29 November 2004	26 Februari 2008 (Perpres No. 18/2008)
		Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China	21 November 2015	1 Agustus 2019 (Perpres No.112/2018)
		2nd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	29 Oktober 2010	7 Juli 2011 (Perpres No. 37/2011)
		3rd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	19 November 2012	4 Juni 2014 (Perpres No.54/2014)
		Agreement on Trade in Service of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China	14 Januari 2007	26 Februari 2008 (Perpres No.18/2008)
		Protocol To Implement The Second Package Of Specific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China	16 November 2011	1 Mei 2013 (Perpres No.30/2013)
	RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	15 November 2020	27 September 2022 (UU No.24/2022)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Bilateral	IACEPA	Indonesia-Australia CEPA	4 Maret 2019	5 Juli 2020 (UU No.1/2020)
	ICCEPA	Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods)	14 Desember 2017	10 Agustus 2019 (Perpres No.11/2019)
		Indonesia-Chile CEPA (Trade in Services)	22 November 2022	dalam proses ratifikasi
	IJEPA	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement	20 Agustus 2007	19 Mei 2008 (Perpres No.36/2008)
	IECEPA	Indonesia- EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement	16 Desember 2018	7 Mei 2021 (UU No.1/2021)
	IUEACEPA	Indonesia-Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement	1 Juli 2022	September 2023
	IMPTA	Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement	27 Agustus 2019	6 Juni 2022 (Perpres No.90/2021)
	IPMOU	Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products	12 Desember 2017	21 Februari 2019 (Perpres No.34/2018)
	IKCEPA	Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2020	27 September 2022 (UU No.25/2022)
	IPPTA	Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement	3 Februari 2012	17 November 2012 (Perpres No.98/2012)
	IIPTA	Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement	23 Mei 2023	Dalam Proses Ratifikasi
	IMBTA	Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement	8 Juni 2023	Dalam Proses Ratifikasi

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Multilateral	World Trade Organization (WTO)	WTO General Agreement on Tariffs and Trade 1994	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO The General Agreement on Trade in Services (GATS)	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO Agreement on Trade Facilitation	7 Desember 2013	22 November 2017 (UU No. 17/2017)
		WTO Agreement on Fisheries Subsidies-Ministerial Decision	17 Juni 2022	belum diratifikasi
Plurilateral	Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)	Framework Agreement On Trade Preferential System Among The Member States Of The Organization Of The Islamic Conference (TPS-OIC)	4 Februari 1992	20 Mei 2011 (Perpres No.31/2011)
	Organisasi Komoditas Internasional	International Coffee Agreement (ICA) 2007	28 September 2007	19 Oktober 2008 (Perpres No. 63/2008)
		International Coffee Agreement (ICA) 2022	8 Maret 2023	belum diratifikasi
	Delapan Negara Berkembang (D8)	Preferential Trade Arrangement D-8 (PTA D8)	13 Mei 2006	9 September 2011 (Perpres No.54/2011)



Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan
JI. M.I. Ridwan Rais No.5,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Tel. 021 23528600 ext.36900
Fax. 021 23528610

Copyright @Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan
Internasional Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia